

PIDATO KENEGARAAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
DJENDERAL SOEHARTO

DIDEPAN SIDANG DPRGR
16 AGUSTUS 1970

REPUBLIK INDONESIA

Presiden Soeharto :

.....Jang penting adalah sikap kita. Kita harus makin matang dalam menilai segala pengalaman itu. Kita tidak* akan lupa diri dalam sukses-sukses; kita djuga tidak akan putus asa dalam kegagalan. Kita terus berusaha dalam menghadapi kesulitan; dan kita lebih giat berusaha dalam mentjapai hasil. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan jang sama; tetapi kita harus mentjapai sukses-sukses baru, mengumpulkan hasil demi hasil, mentjapai kemandjauan demi kemandjauan".



*Presiden Republik Indonesia
Djenderal soeharto*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan para Anggota D.P.R.-G.R. jang saja hormati;

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Besok — 17 Agustus 1970 — Republik Indonesia berusia se-perempat abad!

Selama 25 tahun kita telah hidup sebagai Bangsa jang merdeka; selama 25 tahun kita telah mengurus rumah-tangga kita sendiri. Selama itu kita telah kaja dengan pengalaman : kita menghadapi segala matjam tjobaan dari luar dan dari dalam, kita menikmati sukses dan kita djuga menderita karena kegagalan-kegagalan; perdjalanan kita kadang-kadang latjar, kadang-kadang djuga, berat — bahkan sangat berat. Hal itu adalah kodrat hidup ! Setiap orang, setiap keluarga, djuga setiap Bangsa — jang manapun — mengalami pasang-naik dan pasang-surut.

Jang penting adalah sikap kita. Kita harus makin matang dalam menilai segala pengalaman itu, Kita tidak akan lupa diri dalam sukses-sukses; kita djuga tidak akan putus asa dalam kegagalan. Kita terus berusaha dalam menghadapi kesulitan; dan kita lebih giat berusaha dalam mentjapai hasil. Kita tidak boleh mengulangi kesalahan jang sama; tetapi kita harus mentjapai sukses-sukses baru, mengumpulkan hasil demi hasil, mentjapai kemandjauan demi kemandjauan.

Sebagai Bangsa jang ber-Ketuhanan, kita selamanja meng-utjap sjukur kehadirat Tuhan Jang Maha Esa. Iman kita tidak

akan gojah dalam menghadapi musibah, iman kita djuga tidak akan gojah dalam menerima pahala. Tjoba-Nja kita hadapi dengan penuh tawaqal; rachmat-Nja kita sambut dengan sjukur!

Mendjelang peringatan hari bersedjarah ini, kita menundukkan kepala, mengenang djasa pahlawan Bangsa jang telah mendahului kita, mereka jang telah memberikan segala-galanja untuk Kemerdekaan ini, mereka jang selama hidup sampai saatnja jang terachir berdjoang untuk kepentingan Bangsa; mereka jang gugur dimedan-perang atau ditempat-tempat pembuangan pada mass merintis kemerdekaan, mereka jang gugur selama Perang Kemerdekaan, mereka jang gugur selama masa menegakkan kemerdekaan, mereka jang gugur dalam menegakkan prinsip. Rita kenang semua djasa mereka; dari Tengku Umar sampai Pattimura, dari Slamet Rijadi sampai Achmad Yani, dari Ki Hadjar Dewantoro sampai Arief Rachman Hakim, dan ratusan ribu lainnja baik jang terkenal maupun jang tidak dikenal. Kita „berhutang” atas pengorbanan mereka; sebab itu kita landjutkan tjita-tjita mereka, tjita-tjita kita semua.

Selama 25 tahun kemerdekaan ini kita telah mentjapai banjak hasil; tetapi harapan kita, masih lebih banjak, dan kita sadar jang harus kita kerdjakan masih djauh lebih banjak lagi.

Rita memiliki kemerdekaan; bukan hadiah dari bekas pendjadjah, melainkan hasil perdjoangan berat dan pengorbanan besar dari seluruh Rakjat: puluhan, bahkan ratusan tahun sebelumnja. Nita memiliki falsafah Negara dan Undang-undang Dasar, bukan buatan orang-orang asing; melainkan hasil penggalian dari sedjarah dan kepribadian kita sendiri, disusun oleh pemimpin-pemimpin dan pemikir-pemikir Bangsa Indonesia. Kitts memiliki Angkatan Bersendjata: bukan warisan, tetapi Angkatan Bersendjata jang tumbuh dari tengah-tengah Rakjat jang berdjoang. Kita memiliki Taman Kanak-kanak sampai Universitas, kita memiliki irigasi sampai bendungan, kita memiliki saluran-saluran air minum sampan pembangkit tenaga listrik, kita memiliki industri-industri ringan sampai tambang-tambang;

bukan hanya peninggalan masa sebelum kemerdekaan, tetapi banjak yang kita bangun sendiri.

Sebagian — baru sebagian ketjil dari kita telah menikmati hasil-hasil Kemerdekaan ini. Tetapi sebagian terbesar — pradjurit-pradjurit, **pegawai-pegawai**, pedagang-pedagang ketjil, petani -petani ketjil, buruh — masih hidup dalam keadaan yang berat. Mereka ini masih tinggal dirumah-rumah yang buruk, digang-gang dan kampung-kampung yang kotor, tanpa air minum yang bersih dan penerangan listrik, rendah nilai gizi makanannya, gelisah memikirkan sekolah dan pendidikan anak-anaknya, seolah-olah masih gelap masa depannya.

Ja, mengapa selama seperempat abad merdeka, kita masih dalam keadaan yang demikian?

Keadaan yang berat ini terutama disebabkan karena selama itu kita belum sempat melaksanakan pembangunan ekonomi dalam ini yang sesungguhnya atau, kalau kesempatan itu sudah ada, tidak digunakan setjara tepat. Sebagian, — tidak adanya pembangunan ekonomi itu — memang karena prioritas perdjangan tiap-tiap tahap belum memungkinkan, sebagian lagi karena kesalahan-kesalahan yang kita perbuat.

Pada usia seperempat abad Republik Indonesia ini, sungguh pada tempatnya kita meninjau kembali seluruh perdjalan kita selama ini. Kita buang hal-hal yang buruk, kita pelihara hasil-hasil yang baik dan kita terus mentjari kekuatan-kekuatan baru yang menjegarkan.

Lebih dari itu, mendjelang usia 25 tahun kemerdekaan; kita masing-masing: setiap partai, organisasi karya, setiap pedjabat dan setiap individu, wadjib melakukan penilaian pada pribadi, mengadakan introspeksi yang sedalam-dalamnya, apa saham yang telah kita berikan kepada nusa dan bangsa, sumbangsih apa yang telah kita berikan untuk kepentingan Rakjat banjak.

Terlebih-lebih bagi mereka yang telah berkesempatan mengetjap nikmat kemerdekaan ini hendaknya merenungkan sedalam-dalamnya, menengok kebelakang dan mengingat bahwa kenik-

matan itu adalah berkat perdjongan seluruh Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke; dan karena itu mereka itu berkewadajiban untuk membalasnja dengan bakti dan pengabdian jang tulus. Tidak sebaliknja malah lupa daratan, seolah-olah kemerdekaan ini miliknja sendiri.

Marilah kita lihat kembali sedjarah kita itu dari 1945 hingga sekarang.

Tahun 1945 - 1950.

Tahap perdjongan waktu itu adalah perang melawan pendjadjah jang akan kembali menguasai Tanah Air kita. Prioritas perdjongan disini ialah perdjongan bersendjata, musuh kita jang paling utama disini adalah kaum pendjadjah dan mereka jang membantunja, pahlawan-pahlawan kita disini adalah mereka jang gugur dimedan pertempuran. Segala usaha dan tindakan, segala kemampuan dan organisasi, kita tumpahkan dalam perdjongan-perdjongan bersendjata ini. Waktu itu, kita memang telah mengadakan rentjana pembangunan jang sangat sederhana, tetapi belum sempat dilaksanakan. Aparatur Pemerintahan dan kekuatan ekonomi belum sempat kita susun dengan baik; malahan kita menghantjurkan dan mem-bumi-hangus-kan segala jang dapat dipakai oleh musuh. Demikian prioritas dan tuntutan perdjongan waktu itu. Berkat keteguhan hati kita, berkat persatuan dan kesatuan seluruh Rakjat dan berkat tekad perdjongan kita jang pantang menjerah serta merelakan pengorbanan apa sadja jang diperlukan, maka achimja kita menang; kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh dunia.

Tahun 1950 - 1960.

Dalam tahap ini kita mengalami masa penertiban diri ke-dalam.

Sesudah pengakuan kedaulatan timbul pola-pola fikiran baru, jang ingin merombak dasar dan tudjuan Negara; baik dengan tjara-tjara parlementer maupun dengan pemberontakan-pemberontakan, baik dengan terbuka maupun gerakan dibawah tanah.

Dibidang politik dan ekonomi berkembang praktek-praktek liberalisme jang buruk. Muntjul puluhan partai baru jang tidak djelas programnja, Pemerintah djatuh bangun dalam waktu singkat, ekonomi liberal berkembang tanpa arah, pemberontakan bersendjata bermuntjulan jang hampir semuanya merupakan kelandjutan daripada pergolakan politik. Gangguan keamanan jang sangat luas, telah meminta banjak korban djiwa dan harta, telah meminta banjak biaja untuk memulihkan keamanan, telah mengakibatkan terlantarnja daerah-daerah produksi pangan dan perkebunan jang sangat luas.

Kita selesaikan pergolakan-pergolakan ini tahap demi tahap. Negara Serikat kita kembalikan kepada Negara Kesatuan. Pemberontakan-pemberontakan dapat kita selesaikan. Kematjetan Sidang Konstituinie jang hampir-hampir menimbulkan perpetjahan Bangsa kita atasi dengan kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Tahun 1960 - 1965.

Periode ini ditandai dengan gedjolak perdjoangan Bangsa antara hidup dan mati, perdjoangan untuk tetap hidup dan tegaknja Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945.

Kembalinja berlaku Undang-undang Dasar 1945 telah didekritkan, penumpasan gelombang pemberontakan telah hampir dapat diselesaikan setjara keseluruhan, namun tantangan dan bahaja baru telah timbul dalam periode ini, ialah bahaja dan praktek-praktek penjelewengan terhadap Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945 itu.

Dalam tahap ini kita memang mentjatat perdjoangan jang sangat besar, ialah pembebasan Irian Barat. Tetapi sedjarah djuga mentjatat penjimpangan-penjimpangan jang luar biasa terhadap pelaksanaan Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945, dengan segala akibatnja jang memerosotkan segala segi kehidupan Bangsa kita.

Saja pernah menegaskan: bahwa Pantja Sila bukan sekedar „sembojan” kosong, Undang-undang Dasar bukan sekedar „dokumen” mati. Pantja Sila adalah kebulatan pandangan hidup

Bangsa kita, kristalisasi daripada kepribadian Bangsa kita dan sekaligus wujud tata-pergaulan hidup jang kita tjita-tjitakan.

Undang-undang Dasar 1945 membuat prinsip-prinsip dasar bagaimana Negara ini kita arahkan, bagaimana Pemerintahan dikendalikan, bagaimana tata-pergaulan hidup masyarakat, apa hak-hak azasi dan kewadajiban-kewadajiban azasi warga negara:

Apa jang terdjadi pada tahun-tahun 1960 - 1965?

Ideologi kita, Pantja Sila, lama-kelamaan dirobah mendjadi „nasakom”. Dalam kehidupan kepartaian muntjul peng-kotak-kotakan ideologi jang makin lama makin meruntjing, jang mengakibatkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat dan djuga meng-kotak-kotakkan masyarakat itu sendiri.

Demokrasi berdasarkan Pantja Sila, berobah mendjadi „demokrasi terpimpin”; jang dalam prakteknja sudah mendekati sistim diktatur.

Adjaran-adjaran „revolusi” jang tidak pernah selesai itu, lama-kelamaan melahirkan sikap „tudjuan menghalalkan tjara”.

Dengan dalih untuk kepentingan „revolusi”, dengan „sembojan-sembojan Revolusioner”, dengan „hukum Revolusi”, maka dasar-dasar ketertiban, prinsip-prinsip organisasi dan kepengusahaan, prinsip-prinsip ekonomi, lambat-laun ditinggalkan.

Masalah-masalah ekonomi diabaikan, sehingga negara kita mendjadi salah satu negara jang ekonominja paling buruk diseluruh dunia.

Dalam tahun 1960 memang telah tersusun naskah rentjana pembangunan — Pembangunan Nasional Semesta Berentjana — tetapi rentjana tersebut bukan sadja tidak realistis dan tidak berdasarkan kemampuan jang ada, tetapi kebidjaksanaan dan praktek Pemerintah serta kegiatan masyarakat sama sekali tidak ditudjukan untuk melaksanakan pembangunan, melainkan ditudjukan untuk mendukung kebidjaksanaan politik konfrontasi jang dianutnja waktu itu, sehingga rentjana pembangunan itu tetap tinggal rentjana sadja.

Politik luar negeri jang babas aktip, berobah mend jadi politik luar negeri jang konfrontatif dan setjara a priori memihak

kepada salah satu blok dunia, sehingga kita menganut politik luar negeri poros Djakarta — Hanoi — Peking, dan dilain pihak mengisolir diri dengan keluar dari keanggotaan PBB.

Segala matjam „ajaran revolusi” jang keliru ini dipompakan melalui indoktrinasi setjara sistematis dan sertahun-tahun ke-pada masyarakat. Akibatnja kita rasakan — sebagian djuga sampai saat ini —: kemunduran ekonomi jang luar biasa, serta ketidak-tertiban, tidak dipatuhinja hukum dan undang-undang, aparaturnegara jang tidak efisien; dan jang paling buruk — seperti penilaian MPRS pada tahun 1966 — ialah kemerosotan moral dan ahlak.

Proses kehidupan Bangsa dalam segala segi jang merosot itu, sedjalan dengan usaha-usaha PKI untuk „mematangkan situasi” sebagai persiapan pemberontakan jang meletus pada achir tahun 1965. Tujuan pemberontakan ini djelas bukan hanja menggulingkan Pemerintahan, bukan hanja pembunuhan kedjam terhadap Pimpinan Angkatan Darat; melainkan mempunjai tujuan jang lebih dalam lagi, ialah mengganti Pantja Sila dengan dasar negara jang lain.

Sjukur Alhamdulillah, pemberontakan ini dapat kita atasi ; dan jang paling penting : Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945 dapat kita selamatkan. Pantja Sila tetap hidup dengan tegak 1

Pemberontakan ini membuat kita semua tergugah !

Kita bukan sadja menumpas pemberontakan itu ; tetapi kita djuga — dan terutama — meneliti sebab-sebab jang lebih dalam daripada pemberontakan ini ; bahkan djuga meneliti seluruh djalannja perdjongan dalam tahap-tahap sebelumnja.

Itulah sebabnja, beberapa tahun jang lalu saja telah menegaskan bahwa : „Kita tidak akan kembali kealam liberalisme, dan kita djuga tidak akan kembali kealam „demokrasi ter-pimpin”. Ajaran-ajaran seperti „nasakom”, „hukum revolusi”, „politik mertju-suar” dan sebagainja itu telah kita tinggalkan sedjak tahun 1966 ; dan harus kita tinggalkan selama-lamanja !”

Tahun 1966 dan seterusnya.

Mulai tahun 1966 kita isi lembaran baru ialah pengisian Kemerdekaan ! Tahap inilah jang kita sebut Orde-Baru.

Kemana arah perdjalanannya kita sekarang dengan Orde-Baru itu ?

Dengan apa dan bagaimana kita isi kemerdekaan ini ? Djawabannya sangat djelas. Saja akan mengulangi pene-gasan penegasan saja sedjak tahun 1966 :

- Orde-Baru adalah tatanan seluruh kehidupan Rakjat, Bangsa dan Negara jang kita letakkan kembali kepada kemurnian pelaksanaan Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- Orde-Baru merupakan koreksi total atas penjelewe-ngan-penjelewe-ngan disegala bidang jang terdjadi pada masa-masa sebelumnya ; dan dilain fihak, ber-usaha menjusun kembali kekuatan Bangsa kita dan menentukan tjara-tjara jang tepat untuk menumbuh-kan stabilitas Nasional djangka pandjang, sehingga mempertjepat proses pembangunan Bangsa berdasar-kan Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945 ;
- Dilihat dari prosesnya, Orde-Baru adalah satu proses-sosial jang pandjang ; sebab penjelewe-ngan-penjelewe-ngan jang terdjadi pada masa-masa jang lampau berdjalan sertahun-tahun sehingga hampir menjentuh segala segi kehidupan Bangsa kita ;
- Untuk mewujudkan Orde-Baru harus ada peromba-kan sikap mental jang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan; memerlukan pola sikap dan pole bekerdja jang ber-orientasi kepada program.

Ja, koreksi total ini harus berani kita lakukan terhadap diri kita sendiri ; sebab, keadaan sekarang adalah warisan masa

lampau jang buruk itu, dan sebagian besar dari kita adalah bagian dari warisan itu !

Hanja dengan keberanian mengadakan koreksi kepada diri kita sendiri, kita dapat membangun masa depan jang tjerah.

Kita harus membentuk masjarakat baru, dengan wadjah baru, dengan semangat baru, diatas dasar-dasar kita jang lama jaitu Pantja Sila.

Kita djadikan Republik Indonesia ini sebagai wadah perumahan keluarga besar Bangsa Indonesia ; dimana kita semua merasa „krasan” didalamnja, merasa tenteram bathin dan aman djiwa kita, bergairah mengembangkan bakat dan bangga karena berprestasi, dilindungi hak-hak kita dan dengan sadar mendjalankan kewadajiban-kewadajiban sebagai warga negara jang bertanggung-djawab.

Kita harus membangun masjarakat baru jang lebih demokratis, lebih rasionil, lebih toleran dan lebih terbuka, jang menghargai kerdja dan hasil kerdja.

Kita harus mengembangkan stabilisasi Nasional jang tertib dan dinamis, baik dibidang politik, dibidang ekonomi maupun dibidang sosial.

Sesungguhja saat ini kita sedang bergerak kearah proses itu. Kita sedang mengadakan pembaharuan-pembaharuan kelembagaan, sikap mental dan pola berfikir itu: pada seluruh aparatur -negara dan aparatur perekonomian negara, pada organisasi-organisasi karya dan partai-partai politik, pada kekuatan-kekuatan ekonomi masjarakat ; pendeknja seluruh tubuh Bangsa dan Negara kita.

Bahkan kita, sedjak tahun 1966, telah meninjau kembali setjara menjeluruh dan menentukan prioritas-prioritas per-djoangan pada tingkat sekarang ini.

Prioritas-prioritas per-djoangan itu telah ditetapkan oleh MFRS. Intinja ialah: mengatur kembali rumah-tangga Negara kita, mewudjudkan stabilisasi politik dan stabilisasi ekonomi, sehingga kita dapat melaksanakan pembangunan.

Itulah jang kita kerdjakan sedjak tahun 1966 ; memberi isi kepada Kemerdekaan ini berdasarkan pada Undang-undang Dasar 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPRS.

Bagaimana pelaksanaan tugas Orde-Baru hingga kini ? Apakah hasil-hasil jang telah kita tjapai selama 4 — 5 tahun ini ?

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Adalah tidak saderhana untuk membuat neratja pasang-surutnja perdjongan selama 4 - 5 tahun terachir ini setjara objektif, oleh karena kita akan sangat dipengaruhi oleh perasaan-perasaan subjektif, jang pada umumnja akan selalu mendjurus pada perasaan tidak puas, jang disebabkan oleh harapan kita jang sering-sering terlalu muluk-muluk dan tidak realists.

Sebenarnja perasaan tidak puas itu adalah baik, selama dilandasi dengan iktikad dan langkah-langkahnja untuk memperbaiki dan lebih memperbaiki keadaan dan hasil-hasil jang telah ditjapai; tidak sekedar untuk melontarkan perasaan tidak puas tanpa mentjari djalan keluarnja jang lebih baik, atau bahkan malahan melakukan tindakan tindakan jang ngawur dan destruktif jang djelas akan meniadakan hasil-hasil jang telah ditjapai.

Marilah kita gunakan ukuran jang gampang dan sangat sederhana — setjara „bodon”, kata orang Djawa — untuk menilai proses keadaan dan kemandjuan dalam berbagai segi kehidupan Orde-Baru ini dalam 4 - 5 tahun terachir ini, ialah ukuran „tuntutan Rakjat”.

Kita masih ingat bahwa pada achir tahun 1965 setelah pemberontakan jang gagal dari G-30-S/PKI dan melandjut sampai pada permulaan tahun 1966 telah menggema dan menggelora TRITURA — tiga matjam tuntutan Rakjat ialah: pembubaran PKI; turunkan harga dan bersihkan Kabinet Dwikora.

Kemudian masih segar pula dalam ingatan kita dalam achir tahun 1967 dan permulaan tahun 1968 — pada saat itu ada kenaikan harga-harga dan krisis beras — adanja tuntutan lagi dari masjarakat jang dipelopori oleh mahasiswa-peladjar dan

pemuda jang intinja menuntut dua hal --- bukan lagi tiga — ialah turunkan harga beras dan berinias korupsi.

Dan sekarang pada permulaan tahun 1970 hingga saat ini menggema lagi suara mahasiswa-pemuda menuntut satu hal, ialah ditingkatkannja pemberiniasan korupsi.

Dari ukuran jang sederhana ini tampak dan dapat kita simpulkan bahwa kita telah mentjapai kemajuan, telah dua hal dari tiga tuntutan tersebut jang terpenuhi.

Apabila kita perluas sedikit masalahnja, maka kita dapat mengatakan bahwa tuntutan dibidang politik — pembubaran PKI — tidak djadi tuntutan lagi, karena telah terpenuhi. Demikian pula masalah ekonomi — turunkan harga — tidak merupakan tuntutan lagi, karena telah tertjapai stabilitas harga-harga; tinggal masalah aparatur - korupsi — jang masih harus diintensifkan penggarapannja.

Tentu, masalahnja tidak sesederhana jang saja kemukakan tadi: „tri tura” mendjadi „eka tura”. Namun dengan menggukkannja sebagai pangkal tolak, kita akan dapat lebih mudah untuk mendalami masalah-masalahnja.

Tuntutan pembubaran PKI bukan sekedar berarti hilangnya partai PKI dari pertjaturan politik, tetapi dapat diperluas dan mempunjai makna akan tekad untuk mempertahankan, memurnikan dan melaksanakan Pantja Sila dan Undang-undang Dasar **1945**, tertjiptanja suatu kehidupan masyarakat jang demokratis, dinamis, tertib dan berdasarkan hukum.

Tuntutan penurunan harga menjimpulkan tekad untuk mentjiptakan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, mentjiptakan kondisi ekonomi jang baik buat pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan tuntutan bersihkan Kabinet Dwikora atau pemberiniasan korupsi mempunjai makna tekad Bangsa untuk memperbaiki dan membersihkan Aparatur Negara, sehingga tertjitalah Aparatur Negara jang efektif, efisien, bersih dan berwibawa.

Saudara-saudara sekalian;

Sebelum saja melandjutkan membuat neratja keadaan Orde-Baru dewasa ini, saja ingin menegaskan sikap saja terhadap tuntutan-tuntutan jang timbul dalam masjarakat sebagai berikut:

- Terhadap tuntutan jang wadjar, jang masuk akal dan jang didorong oleh kemauan baik, maka bukan hanja saja perhatikan, malahan saja laksanakan dan merupakan dorongan moril jang kuat bagi saja untuk bekerdja.
- Tetapi, terhadap tuntutan jang ditjari-tjari, tuntutan jang berselimut untuk tudjuan-tudjuan mendjegal pelaksanaan tugas Pemerintah dalam melaksanakan program program Nasional, pasti tidak akan saja lajani.

Tugas seorang Presiden bukan hanja menuruti sadja segala matjam tuntutan; sebab bila demikian, is pasti tidak dapat berbuat apa-apa. Seorang Presiden Republik Indonesia memang harus mendengarkan suara masjarakat, meneliti dan menimbangnja — tidak semata-mata dengan selera pribadinja sendiri — melainkan berdasarkan tugas pokok jang digariskan oleh MPRS.

Dengan pendirian jang demikian itulah saja memperhatikan segala suara masjarakat selama saja memimpin Pemerintahan.

Marilah sekarang kita menilai keadaan dan kemandjuan kemandjuan jang kita tjapai diberbagai bidang dengan memakai pangkal tolak dan sistimatik tiga bidang seperti tensirat dalam tri tura itu ialah : bidang sosial politik, bidang sosial ekonomi dan bidang aparatur negara.

Keadaan sosial-politik:

Dalam bidang ini masalahnja adalah: sampai dimana kita berhasil menggalang stabilitas politik, dalam arti tertjiptanja kedalam kehidupan masjarakat jang demokratis dan dinamis, tertib dan berdasarkan hukum dalam djangka jang relatif pandjang dan — keluar — tertjiptanja hubungan antar

Bangsa jang saling harga menghargai, saling pertjaja memper-tjajai tanpa tjampur tangan urusan rumah tangga masing-masing dan saling memberi manfaat.

Dengan pangkal tolak ukuran itu, maka kita dapat mentjatat serentetan kedjadian jang menggambarkan hasil-hasil per-djoangan jang sangat mempunjai ini dalam perkembangan sedjarah dan kehidupan Orde-Baru.

Dalam tahun 1965/1966 (setelah G-30-S/PKI), Orde-Baru telah berdjoang melalui landasan konstitusionil dan hukum untuk mengamankan dan mendjamin tegaknja Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945. Hasil-hasil njata dalam hal ini adalah keluarnja „Super-semar” dan keputusan pembubaran PKI jang kemudian disusul dengan Sidang ke-IV MPRS jang menghasilkan landasan-landasan perdjongan baru diberbagai bidang setjara konstitusionil.

Dalam tahun 1967 Orde-Baru berhasil mengachiri keadaan dualisme dalam Pemerintahan setjara konstitusionil melalui Ketetapan MPRS No. XXXIII/1967, produk dari Sidang Isti-mewa MPRS dalam tahun tersebut.

Dalam tahun 1968 Orde-Baru lebih madju lagi dalam usaha mengkonsolidasikan stabilitas Nasional dengan memperkokoh kepemimpinan Nasional — pengangkatan pedjabat Presiden mendjadi Presiden — serta membulatkan tekad untuk melak-sanakan pembangunan Nasional. Hal ini dihasilkan oleh Sidang Umum ke-V MPRS.

Disamping hasil-hasil positif ini, kita mengalami Pula akibat sampingan daripada penyelenggaraan Sidang MPRS ini, ialah tidak berhasilnja dirumuskan haluan negara dan haluan pem-bangunan jang terperintji, jang sudah barang tentu menimbul-kan berbagai ketegangan diluar setelah selesainja Sidang ter-sebut. Tetapi berkat kemauan baik dan kebesaran djiwa dari semua fihak, perbedaan pendapat tersebut tidak sampai me-runtjing. Melalui berbagai djalan dan musjawarah, achirnja tertjapailah konsensus untuk melaksanakan bersama tugas-tugas Nasional, terutama pelaksanaan I bangunan Lima Tahun jang dapat dimulai pada tahun 1969.

Chusus dalam kehidupan kepartaian selama Orde-Baru ini, kitapun mentjatat berbagai langkah-langkah penting jang madju. Kita masih ingat kehidupan dan hubungan antara partai jang penuh sjakwa-sangka dan ketjurgiaan pada tahun-tahun. 1966 - 1967 dan 1968. Sampai-sampai PNI — termasuk partai jang tua dan besar — dibekukan untuk memberikan kesempatan „membersihkan” dirinja. Sjukur alhamdulillah achirnja partai tersebut dapat „bersih” kembali, dapat diterima oleh golongan-golongan kekuatan masjarakat lainnja dengan wadjar, hingga saat ini.

Kita djuga mentjatat kemadjuan lain dalam bidang kepartaian ini dengan diakuinja partai baru — Partai Muslimin — sebagai himpunan organisasi-organisasi Islam jang belum mendjadi anggota sesuatu partai. Dengan kelahiran partai Muslimin, djelas akan lebih mengkonsolidasikan dan memberihan wadah jang lebih efektif dalam kehidupan kepartaian kita.

Konsolidasi kehidupan kepartaian berdjalran terus. Dalam rangka lebih mengefektifkan kehidupan kepartaian kita Serta lebih memperkokoh persatuan dan kesatuar Bangsa telah dilakukan usaha-usaha pengelompokkan partai-partai mendjadi dua kelompok berdasarkan prioritas program — kelompok Spirituil dan kelompok Materiil — tanpa menghilangkanan kepribadian masing-masing partai jang ada itu sendiri.

Langkah-langkah pengelompokkan ini lebih-lebih diperlukan dalam kita semua bersiap-siap dan bertekad untuk mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum dalam tahun 1971, sebagai sarana demokrasi jang pokok dan untuk meningkatkan peranan partai dalam menjusun rentjana dan melaksanakan Pembangunan Lima Tahun jang sekarang dan terlebih-lebih jang berikutnja.

Mengenai kehidupan konstitusionil sudah djelas terdapat kemadjuan-kemadjuan Pula. Lembaga lembaga Negara tertinggi - MPRS, Presiden, DPR-GR, DPA dan BPK — telah melaksanakan fungsinja menurut semangat dan ketentuan-ketentuan Undang-undang Dasar 1945. Kenjataan ini merupakan

kemadjuan persoalan prinsip! Pelaksanaannya texas kita sempurnakan dalam praktek dan dengan sertambah banjaknya pengalaman.

Undang-undang Dasar kita sendiri menundjukkan bahwa disamping Undang-undang Dasar sebagai hukum dasar yang tertulis, kita juga perlu mengembangkan praktek penyelenggaraan Negara menuju kearah yang makin sempurna, tanpa menjimpang dari azas dan sendi Negara yang ditetapkan dalam Undang-undang Dasar 1945.

MPRS melalui sidang-sidangnya telah menggariskan haluan negara dan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah bersama DPR-GR. Dalam pelaksanaannya Presiden/Mandataris MPRS harus mempertanggung-djawabkan segala langkah-langkah dan kebijaksanaannya kepada MPRS.

Mengenai hubungan antara Pemerintah dengan DPR-GR, kiranya kita sama-sama menilai bahwa praktek hubungan ini cukup efektif dan positif, meskipun tidak jarang melewati keadaan-keadaan yang tegang dan keras.

Pada kesempatan ini, saya ingin menjampaikan terima kasih kepada Dewan yang telah menundjukkan kerdjasama yang baik dengan Pemerintah, sehingga berbagai masalah dan Undang-undang yang pokok dan penting seperti APBN, perpadjakan, perbankan, pemilihan umum dan lain-lain dapat diselesaikan tepat pada waktunya, yang sangat membantu kelatjaran tugas-tugas Pemerintah yang dibebankan padanya oleh MPRS. Saya berpendapat, bahwa adanya kerdjasama yang baik itu bukan berarti Dewan Perwakilan Rakyat ini hanya „tunduk” kepada kemauan Pemerintah, bukan pula karena Pemerintah „memaksa” Dewan.

Penilaian seperti itu tidak sesuai dengan kenyataan, dan hanya menurunkan martabat Dewan ini.

Saya pertjaja kerdjasama yang baik tadi lahir dari pertimbangan-pertimbangan yang wajar, kemenangan fikiran sehat dan sikap bidjaksana, didorong oleh panggilan tanggung-djawab untuk kepentingan seluruh Rakyat.

Saudara Ketua ;

Masih ada sedjumlah Undang-undang jang harus kita selesaikan setjepatnja dimasa depan ini, jang perlu mendapatkan prioritas penjelesaiannja tanpa mengurangi pentingnja Rantjangan Undang-undang jang lain.

Undang-undang mengenai hubungan Pusat dan Daerah serta mengenai Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah tjukup lama kita babas, sehingga sudah tiba waktunja kita mengambil kebulatan pendapat.

Pemerintah djuga telah menjampaikan Rantjangan Undang-undang Pokok Pertahanan-Keamanan Nasional, jang penjelesaiannja setjara segera akan memberikan landasan jang kuat dalam pembinaan ketahanan Nasional kita.

Undang-undang Pokok Pendidikan djuga perlu segera kita selesaikan agar dasar dan pengarahannya diberikan bagi generasi muda benar-benar sesuai dengan tuntutan djaman dan kebutuhan pembangunan. Perlu saja ulangi, bahwa dasar pendidikan itu haruslah bertolak dari dasar pandangan hidup Bangsa kita, ialah Pantja Sila. Sedangkan arahnja, disamping untuk menghasilkan tenaga-tenaga pembangunan jang terdidik, djuga untuk mempertjepat proses pembaharuan masyarakat kearah jang lebih rasionil dan demokratis dengan tetap berpidjak kepada kepribadian kita sendiri. Prinsip lain dalam bidang ini ialah,, bahwa masalah pendidikan merupakan tanggung-djawab bersama dari Negara dan masyarakat.

Proses pembaharuan djuga harus kita bangun dari dasar jang terpokok dari masyarakat ; ialah keluarga. Dalam hal ini, maka Undang-undang Pokok Perkawinan merupakan salah satu unsur jang sangat penting. Kita perlu memiliki Undang-undang Perkawinan setjara Nasional, jang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan jang selama ini mendjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita chususnja golongan masyarakat jang beragama Islam. Saudara Ketua,

Undang-undang Pokok Perkawinan ini saja rasa perlu segera kita selesaikan, sehingga tidak timbul kesan — pada kaum wanita —, bahwa kaum pria jang merupakan mayoritas dalam Dewan ini — dianggap mendjadi „penghalang” dari apa jang memang mendjadi hak kaum wanita dalam perkawinan.

Sidang Jang Mulia dan Saudara-saudara sekalian ;

Saja djuga ingin menjampaikan terima kasih saja atas segala nasehat-nasehat jang diberikan oleh Dewan Pertimbangan Agung kepada saja. Sedjak pembentukannja, Dewan Pertimbangan Agung telah menjampaikan nasehat ; meliputi berbagai bidang jang sangat penting jang kita hadapi bersama.

Pertimbangan itu sangat berguna dalam penggarisan kebidaksanaan Pemerintah ; dan sebagian telah dilaksanakan.

Badan Pemeriksa Keuangan djuga telah mendjalankan tugas dan fungsinja. Seperti kita ketahui, sedjak tahun 1968, --- untuk pertama kali dalam sedjarah kita — Badan ini telah memeriksa pertanggungan-djawab Pemerintah mengenai Perhitungan Anggaran Belandja Negara. Badan ini masih harus kita sempurnakan. Pemerintah sedang menjusun Rantjangan Undang-undang baru mengenai Badan Pemeriksa Keuangan bersamaan dengan penjempurnaan ICW. Dengan langkah ini, maka sekaligus usaha-usaha penertiban keuangan Negara kita landjutkan.

Mahkamah Agung sebagai badan jang memegang kekuasaan tertinggi dibidang hukum dan keadilan djuga telah berusaha mendjalankan tugasnja sesuai dengan makna Undang-undang Dasar serta berusaha pula untuk lebih mendekatkan diri pada masalah-masalah hukum jang bersifat Nasional.

Dalam membina stabilisasi politik, kita tidak hanja melihat hubungan-hubungan formil antara lembaga-lembaga Negara tertinggi, melainkan djuga mengembangkan praktek-praktek demokrasi dalam masyarakat.

Hal ini harus kita wujudkan. Sebab, demokrasi jang kita tumbuhkan bukan hanja demokrasi „formil” sadja, bukan hanja demokrasi jang „dipaksakan” dari atas ; melainkan demokrasi jang tumbuh dan mempunjai akar dalam masyarakat.

Kebebasan mengeluarkan pendapat dan suara, kebebasan mimbar, kebebasan pers, adalah unsur-unsur jang sangat penting dalam menumbuhkan demokrasi dari bawah itu. Dalam hal inipun kebebasan-kebebasan tadi telah banjak kita, nikmati dan terus berkembang. Kita lihat dalam surat-surat kabar, madjalah-madjalah, terbitan-terbitan bulanan dan lain-lain, telah muntjul berbagai tulisan dan buah fikiran jang bermutu. Gedjala ini mempunjai arti jang sangat penting ; bukan hanja tjermin adanja kebebasan itu, melainkan membuat masyarakat kita lebih terbuka, lebih luas pandangan-pandangannja, lebih kritis dan lebih besar rasa tanggung-djawabnja terhadap masyarakat.

Sementara itu terus terang saja harus mengatakan, bahwa masih djuga banjak pers jang mengedjar sensasi, mentjari keuntungan-keuntungan materiil dengan tulisan, berita dan gambar jang bersifat kurang bermutu dan kurang sopan.

Kita harus membangun kehidupan pers jang babas dan bertanggung-djawab! Bukan penggunaan jang salah dari kebebasan ; bahkan sampai-sampai seolah-olah tidak memperhitungkan kepentingan Nasional.

Saudara-saudara ;

Segi lain jang penting jang djelas ada hubungannja dengan kestabilan politik adalah hubungan Pusat dan Daerah. Pelaksanaan otonomi Daerah makin tumbuh dengan sehat tanpa mengurangi prinsip Negara Kesatuan ; sedangkan pembangunan Daerah bermuntjulan dalam rangka Pembangunan Nasional.

Tanpa banjak berbitjara, Daerah-daerah membangun dengan kegairahan jang besar, mulai dari Daerah Tingkat I sampai kedesa-deso. Iklim pembangunan jang makin baik, lain

lintas perhubungan jang makin luas dan lantjar djuga membawa aspek-aspek politik jang sangat penting.

Jang saja maksudkan ialah hilangnja „daerah-isme”! Ini satu kemadjuan jang sangat penting. Kenyataan ini meyakinkan Pemerintah, bahwa disamping makin tertanamnja kehidupan kesatuan Bangsa berdasarkan Pantja Sila, pembangunan ekonomi — chususnya pembangunan prasarana — mempunyai art^y jang besar terhadap pembangunan sosial-politik: mendekatkan rasa persatuan seluruh Bangsa kita dan memperkuat prinsip Negara Kesatuan.

Hingga kini — seperti telah saja katakan tadi kita memang belum berhasil mentjiptakan landasan hukum jang sesuai jang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah, demikian djuga mengenai imbangan keuangan antara Pusat dan Daerah; tetapi ini tidaklah berarti bahwa masalah Daerah dan Pembangunan Daerah terbengkalai. Dengan subsidi Daerah, bantuan kepada Kabupaten sebesar Rp. 50,— seorang dan kepada setiap Desa sebesar Rp. 100.000,— sungguh memberikan potensi jang tjukup besar bagi Daerah-daerah untuk madju dan berkembang.

Saudara-saudara;

Dalam mewujudkan stabilisasi politik, kedudukan dan peranan ABRI memang besar; baik sebagai alat Keamanan-Pertahanan maupun sebagai kekuatan sosial politik. Untuk melaksanakan tugas itu, ABRI terus-menerus disempurnakan kedalam. Integrasi ABRI, baik fisik maupun mental-ideologis, telah djauh lebih madju daripada beberapa tahun jang lain. Hal itu merupakan sjarat mutlak. Sebab, tanpa ABRI jang satu, tanpa ABRI jang setia kepada Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945, mustahil ABRI dapat mendjalankan fungsinya sebagai stabilisator dan dinamisator, dan djuga tidak mungkin melaksanakan tugas-tugasnja setjara strategis dan tehnik sebagai alat pertahanan-keamanan.

Dengan landasan Undang-undang Dasar 1945 dan Pantja Sila seperti jang tertjantum dalam Sapta Marga dan Sumpah

Pradjurit, ABRI ingin dan selalu mengadjak semua kekuatan dalam masyarakat, baik partai politik maupun golongan karya untuk bersama-sama mengamankan dan mengamalkan Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945. ABRI tetap bersama semuanya, karena ABRI milik dari seluruh Rakyat.

Mengenai tugas-tugas keamanan telah dilaksanakan dengan baik. Dalam tahun-tahun terakhir inilah — selama masa kemerdekaan! — tidak lagi terdapat gangguan kekuatan pengatjau bersendjata yang berarti. Insja Allah, keamanan ini dapat terus kita pelihara.

Mengenai sisa-sisa PKI sekarang memang masih meneruskan kegiatannya setjara tertutup; baik dengan sabotase-sabotase, subversi dan menimbulkan ketegangan-ketegangan dalam masyarakat. Mereka tetap berusaha membentuk „grup-grup” gelap dibawah tanah.

Dengan menjatakan hal ini, saja tidak ingin meniupkan ketjemasan dikalangan masyarakat. Saja mendjamin, bahwa alat-alat Negara tetap waspada; dan saja minta agar masyarakat juga tetap waspada.

Segi lain yang menundjukkan perkembangan yang baik adalah pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Republik Indonesia dalam mendjamin keamanan dan ketertiban umum; djustru sesudah Kepolisian dikembalikan kepada fungsinya.

Meskipun belum mentjapai kesempurnaannya, maka Kepolisian Negara sekarang telah dapat lebih memusatkan perhatian dan tugasnya pada pemberiniasan kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya. Kiranya kita semua telah dapat merasakan berkurangnya kejadian kejahatan dan kemajuan keamanan umum makin menenteramkan batin kita. Dengan bekerjasama yang lebih erat dengan alat-alat penegak hukum lainnya dan dengan alat-alat-Pemerintahan di Daerah-daerah, saja yakin Kepolisian Negara akan dapat mentjapai sukses-sukses yang lebih besar dan keamanan Serta ketertiban umum akan makin terdjamin.

Re-disiplinering ABRI makin menundjukkan hasil jang lebih baik. Tindakan-tindakan penjelundupan, penodongan, penggunaan kekerasan guna memperoleh fasilitas umum dan sebagainya jang dilakukan oleh ABRI telah banjak berkurang.

Walaupun demikian segala penertiban kedalam masih belum waktunja dihentikan. Tindakan penertiban kedalam, chususnja terhadap anggota-anggota ABRI jang untuk kepentingan mereka pribadi, melakukan usaha-usaha dengan danih „Operasi-Bhakti” atau „Operasi-Karya”, terhadap mereka jang masih terus melakukan pungutan-pungutan liar, rekwirasi kendaraan dan lain sebagainya, terhadap mereka jang menjeleweng, akan terus dilaksanakan.

Dalam membantu melaksanakan Pembangunan Lima Tahun, ABRI telah mengerahkan tenaga dan fasilitas-fasilitasnja jang tersedia jang sesuai dan memang diperlukan guna kelatjaran tertjapainja sasaran-sasaran pembangunan itu : dibidang industri dengan mengerahkan PINDAD Bandung dan KONATAL Surabaya; dibidang perasarana dengan mengerahkan satuan-satuan konstruksi zeni dan satuan-satuan lainnja; dan usaha-usaha produktif lainnja.

Saudara-saudara ;

Dibidang luar negeri, perobahan dan kemadjuan sangat terasa. Hubungan luar negeri antara Indonesia dengan negar-negara luar jang dilandaskan pada Ketetapan MPRS serta memegang teguh prinsip politik luar negeri jang babas dan aktif sungguh sangat dirasakan manfaatnja, baik dalam meningkatkan posisi Indonesia dalam pertjaturan politik dunia umumnja maupun dalam mengerahkan dana-dana dari luar negeri guna kepentingan usaha-usaha pembangunan kita.

Penghentian konfrontasi dengan Malaysia dan masuknja kembali Indonesia di PBB ditahun 1966 merupakan langkah-langkah penting pertama dari Orde-Baru, sehingga hubungan luar negeri kita sangat meningkat dan lebih positif dan dapat dimanfaatkan bagi usaha Nasional jang diprioritaskan, ialah stabilisasi ekonomi dan pembangunan.

Pembentukan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara ASEAN adalah langkah penting dari Indonesia bersama-sama dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam membina kerdjasama regional dan hubungan persahabatan antara negara-negara tetangga, yang jelas akan berguna bagi pembinaan ketahanan Nasional.

Dengan makin membaiknya stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia serta usaha-usaha kita dipelbagai forum diluar negeri, maka kepertjajaan negara-negara luar terhadap Indonesia makin terasa dan meningkat.

Hasil-hasil positif dibidang hubungan ekonomi luar negeri yang kita tjapai hingga kini seperti bantuan pindjaman ringan dan grant, penundaan pembayaran hutang, mengalirnya modal investor luar negeri ke Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari usaha-usaha dan hasil-hasil positif kita didalam negeri dan kegiatan-kegiatan diplomasi kita diluar negeri.

Satu kemenangan perdjooangan Bangsa yang erat berhubungan dengan kehidupan dunia internasional adalah berhasilnya dilaksanakan "the act of free choice" di Irian Barat dalam tahun 1969 yang lalu. Hasil ini bukan sadya berarti mutlaknya keutuhan kembali wilayah Negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tetapi dengan berhasilnya pelaksanaan kewadajiban internasional itu, maka kepertjajaan dunia internasional terhadap Indonesia tentu makin mantap.

Peranan Indonesia dalam pertjaturan politik internasional djuga semakin besar dan menimbulkan kewadajiban dan rasa tanggung djawab yang lebih besar pula. Sikap dan suara Indonesia yang khusus dan berkepribadian didengar dan diperhitungkan oleh dunia internasional. Hasil-hasil Konperensi para Menteri Luar Negeri di Djakarta mengenai masalah Kamboja; kehadiran Indonesia dalam panitia-panitia persiapan di KTT Non Blok yang akan diselenggarakan bulan depan dimana Presiden R.I. djuga akan hadir; banjaknya keinginan dan keputusan penjelenggaraan konperensi-konperensi internasional di Indonesia, kesemuanya ini menundjukkan besar dan meningkat-

nja peranan kita dalam hubungan internasional sedjak timbulnja Orde-Baru.

Ada orang jang prihatin dan menilai bahwa politik luar negeri Indonesia dewasa ini sudah agak berat sebelah, terlalu ke Barat. Pandangan sematjam ini djelas tidak tepat. Indonesia tetap melaksanakan politik luar negeri jang babas dan aktif dengan tepat, dinamis dan berinisiatif dan tetap tidak menggantungkan diri dengan negara manapun didunia ini. Indonesia ingin bersahabat dan bekerdjasama — terutama di bidang teknik dan ekonomi — dengan negara manapun — blok Barat atau blok Sosialis — atas dasar persamaan deradjat dan saling menguntungkan.

Keadaan Sosial-Ekonomi :

Seperti telah saja tamsilkan tadi, dewasa ini masalah penurunan harga tidak mendjadi tuntutan lagi. Namun, apa jang telah kita tjapai sedjak tahun 1966 hingga sekarang? Hendak kemana gerak ekonomi kita ini? Ja, itulah pertanjaan-pertanjaan penting; bahkan sangat penting. Kita harus tahu, kita harus jakin, apakah kita sekarang ini „mandeg”, mundur atau madju, djika dibanding dengan 4 tahun jang lalu. Kita djuga harus tahu, kemana kita akan bergerak.

Untuk mengukur kemadjuan atau kemunduran, marilah kita lihat kembali keadaan kita pada awal tahun 1966. Saja harus menjebut hal-hal itu, bukan untuk mengutuk masa lalu; melainkan untuk membuat perbandingan dan untuk memperoleh kesimpulan jang benar.

Lima tahun jang lalu kita mewarisi puing-puing ekonomi'. Bukan hanja kerangkanja, melainkan dasarnja ekonomi itu.

Keuangan negara serba kalut. Defisit Anggaran Belandja luar biasa besarnja, dan mendjadi sumber inflasi jang sangat ganas. Negara mengatur dan menguasai segala sektor ekonomi; tetapi tanpa arah. Birokrasi menjentuh setiap gerak ekonomi, biar jang ketjil sekalipun. Djalan-djalan rusak, pe-nerbangan dan pelajaran tidak teratur, air minum matjet dan listrik bergiliran hidup-mati. Rakjat harus antri beras, minjak

tanah, gula dan sebagainya; mobil-mobil harus berderet-deret sebelum mendapat bensin. Rakjat di Ibukota ini — dan kota-kota besar lainnja — harus berdiri berdjam-djam dipanas terik sebelum dapat naik bis atau opelet. Orang tidak pertjaja lagi kepada rupiah jang dipegang; penimbunan dan spekulasi harga barang-barang pokok dan bahan baku mendjadi kebiasaan, dan harga melondjak-londjak dari hari kehari. Hutang-hutang luar negeri digunakan untuk projek-projek „mertju-suar” dan projek-projek lainnja jang tidak didasari oleh perentjanaan dan penelitian jang tehnis mendalam, sehingga merupakan pemborosan dan tidak menggerakkan pembangunan.

Itulah keadaan suram jang kita warisi.

Dalam keadaan demikian, saja ditugaskan oleh MPRS untuk menjetop kemerosotan itu, untuk mewujudkan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi; agar selandjutnja kita dapat segera melatjarkan Pembangunan.

Tugas ini luar biasa beratnja. Saja pernah mengatakan tugas itu adalah tugas kita semuanya, tugas seluruh Rakjat.

Pada achir tahun 1966 saja telah menegaskan, bahwa saja „tidak mendjandjikan adanja perubahan-perubahan jang mendadak mendjadi baik bagi kehidupan Rakjat sehari-hari. Djandji sematjam itu adalah membohongi Rakjat dan membohongi diri sendiri”.

Kemerosotan ekonomi jang luar biasa buruknja itu hanja dapat kita atasi tahap demi tahap.

MPRS menggariskan, bahwa kita harus mengadakan pembaharuan landasan ekonomi kita. Dari ekonomi terpimpin kearah demokrasi ekonomi; meninggalkan prinsip etatisme untuk memberikan keleluasaan kepada pertumbuhan dan daja kreasi Swasta jang sewadjarnja.

Hal ini bukan pekerdjaan ketjil-ketjilan; melainkan perombakan-perombakan besar, bukan sadja masalah tehnis, tetapi masalah prinsip jang menjangkut segi-segi kepentingan, mental dan institusionil.

Inilah yang kita kerjakan sedjak tahun 1966 dan terus kita kendalikan, kita ikuti dengan langkah-langkah pelengkap yang perlu.

Pertama-tama, kita harus membendung keganasan inflasi yang melanda Bangsa dan Negara kita. Sasaran ini dapat kita tjapai setelah sedjak achir tahun 1966 dan waktu-waktu berikutnja Pemerintah mengambil langkah-langkah dibidang keuangan Negara, moneter dan perdagangan, yang berkisar pada :

- penertiban keuangan Negara yang serba kalut;
- pengaturan kembali urusan moneter dan perbankan;
- memberikan kebebasan kepada dunia perdagangan yang sebelumnya dibelenggu oleh sistim „djatah” yang tidak wadjar dan terbeku oleh peraturan berbelit-belit yang mematikan keairahan masyarakat.

Disamping itu diambil langkah-langkah untuk dapat mengusahakan

- penguasaan dan pengendalian harga pangan dan harga sandang (sembilan bahan pokok) dan valuta asing;
- penediaan yang tjukup dari sarana-sarana untuk peningkatan produksi dalam negeri, chususnja pangan dan sandang;
- perbaikan prasarana yang menundjang proses produksi; dan
- perbaikan-perbaikan kelembagaan dibidang perdagangan, perbankan dan fiskal.

Tindakan-tindakan yang telah diambil seperti peraturan 3 Oktober 1966; rasionalisasi tarif dalam bulan Djuli 1967, kenaikan harga minyak bumi pada tanggal 5 Djanuari 1970 dan peraturan 17 April yang lain adalah serangkaian tindakan dibidang ekonomi/keuangan dalam melaksanakan rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi dan pembangunan.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Keadaan ekonomi kita sekarang memang lebih baik.

Saudara-saudara telah merasakan sendiri, pangan dan sandang tjukup dengan harga yang stabil; kita tidak perlu lagi

antri beras, minjak tanah, gula atau garam; harga-harga tidak melondjak-londjak lagi; hubungan dalam kota, antar kota dan antar pulau sudah lebih lantjar baik melalui darat, laut maupun udara. Bukan sadja dikota-kota, tetapi didesa-desapun tampak kegiatan dan kegairahan bekerdja guna perbaikan dan peningkatan penghasilannja.

Semua ini hasil kerdja kita bersama, bahkan Saudara-saudara sudah memberikan pengorbanan sehingga kita mentjapai hasil-hasil-itu.

Saja kadang-kadang terpaksa mengambil putusan-putusan jang berat dan tidak populer.

Tetapi, sekali saja yakin putusan itu benar, dengan mengutjap Bismillah, saja laksanakan. Beberapa kali saja harus mengambil putusan jang sangat berat itu: ialah penjesuaian harga dan tarif, serta kenaikan harga bensin dan minjak tanah seperti jang saja sebutkan tadi.

Sekarang saja yakin, Saudara-saudara setudju dengan saja, bahwa langkah-langkah jang diambil Pemerintah itu adalah benar. Saja merasa bahagia, bila Saudara-saudara mengerti bahwa langkah-langkah itu djustru untuk kepentingan kita bersama.

Kita ingin bahagia, kita harus membangun; dan kita memang harus rela mengeraskan ikat-pinggang!

Saudara-saudara;

Diatas dasar-dasar ekonomi jang sehat itu kita membangun dirt dengan demokrasi ekonomi dimana ada pembagian bidang dan tugas jang djelas antara negara, swasta dan masyarakat atau koperasi. Dalam waktu-waktu jang akan datang, Pemerintah tetap akan mendorong kemandjuaan koperasi ini.

Kita sama sekali tidak menudju „liberalisme ekonomi jang buruk”, walaupun kita meninggalkan „etatisme” jang sama buruknja. Kita sedang melaksanakan Demokrasi ekonomi, dimana Pemerintah memberikan arah dan bimbingan atas kehidupan perekonomian bangsa, sedang pelaksanaannja diberikan keleluasaan kepada masyarakat.

Pemerintah memang memberi arti yang penting kepada peranan „kekuasaan pasaran”; tetapi sebaliknya, Pemerintah tidak akan menjerahkan diri kepada „permainan babas” dari kekuasaan-kekuasaan itu, terutama untuk bidang-bidang yang strategis.

Dengan pengarahan perkembangan ekonomi yang tepat, Pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dan menutup segala lobang untuk manipulasi.

Kita lihat sekarang, manipulasi perdagangan sudah sangat berkurang, penjelundupan ekspor dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. Penjelundupan kedalam sudah sangat minim. Kaum. spekulasi dan tukang tjatut hampir-hampir tidak punya ruang gerak lagi. Sebaliknya para pengusaha yang bersungguh-sungguh yang mau dan mampu membuat perhitungan dan perkiraan keadaan yang saksama pasti akan dapat maju berkembang, karena fasilitas yang diperlukan, seperti permodalan, dan infrastruktur telah diusahakan selalu tersedia.

Sidang yang terhormat;

Dalam kesempatan ini saja akan menjampaikan beberapa segi yang pokok mengenai pelaksanaan tahun pertama REPELITA; sedangkan perintjiannya saja persilahkan para Anggota yang terhormat meneliti lampiran dari naskah tertulis pidato saja ini.

Dapat saja sampaikan, bahwa pada umumnya pelaksanaan tahun pertama REPELITA itu -- 1 April 1969 sampai dengan 31 Maret 1970 berjalan latjar. Dalam beberapa segi memang terdapat hambatan, terutama pada triwulan pertama. Hal ini disebabkan karena kita sekaligus mulai merintis pelaksanaan administrasi pembangunan yang bertudjuan untuk mendjamin pelaksanaan projek-projek pembangunan agar dapat terlaksana sesuai dengan jadwal waktu yang direntjanakan, sesuai dengan biaya yang diperhitungkan dan dengan pertanggung-jawab yang djelas. Dalam waktu-waktu yang akan datang, administrasi pembangunan masih terus kita sempurnakan berdasarkan pengalaman-pengalaman selama ini.

Ditindjau dari segi pembiajaan, maka realisasi Anggaran Pembangunan 1969/1970 melebihi djumlah jang ditetapkan dalam APBN 1969/1970; ialah dart Rp. 87,- miljar meningkat mendjadi Rp. 92,8 miljar, kenaikan ini disebabkan oleh adanja tambahan projek-projek baru jang anggarannja masih dapat disediakan, karena penerimaan djuga dapat ditingkatkan. Djurlah ini apabila ditambah dengan realisasi bantuan projek, akan mendjadi Rp. 118,1 miljar.

Disamping Anggaran Belandja Negara, maka sumber lain untuk melaksanakan program-program Pembangunan itu ialah: kredit perbankan, penanaman modal dalam negeri dan modal asing, serta kegiatan-kegiatan lainnja jang produktif dari masyarakat.

Dapat diperhitungkan, bahwa dalam tahun pertama pelaksanaan REPELITA ini kredit investasi perbankan jang disetudjui dan direalisir berdjumlah \pm Rp. 16,- miljar, sedangkan penanaman modal asing dan dalam negeri jang telah diidjinkan dan telah melaksanakan menanamkan modalnja sebesar \pm Rp. 72,— miljar. Investasi lain jang mudah dinilai adalah jang dilakukan oleh masyarakat desa. Dengan adanja subsidi Rp. 100.000,— setiap desa, jang dalam keseluruhan berdjumlah Rp. 4,6 mil jar, telah menghasilkan kegiatan pembangunan sebesar \pm Rp. 13,- miljar, berarti suatu penambahan investasi sebesar Rp. 8,- miljar dari desa sendiri.

Maka dalam tahun anggaran 1969/1970 itu investasi untuk pembangunan jang djelas dapat diperkirakan, minimal berdjumlah \pm Rp. 225,— miljar, belum termasuk investasi jang dilakukan oleh Daerah dan masyarakat jang tidak terdaftar dan tidak tertjat.

Kenjataan menundjukkan bahwa ada peningkatan kegiatan pembangunan dan produksi, ada kegairahan bekerdja pada Rakjat, sehingga kurang beralasan untuk menjatakan adanja suasana kelesuan dalam masyarakat.

Nilai ekspor — termasuk minyak bum^p — mentjapai lebih dari 1 (satu) miljar dollar Amerika. Hasil tadi sungguh meng-

gembirakan, sebab, djumlah tadi berarti 9,1% lebih tinggi dari sasaran jang kita tentukan dalam tahun pertama REPELITA ini, ialah sebesar US \$. 953,- dan sudah mendekati angka ekspor tertinggi jang pernah kita tjapai selama kemerdekaan, jaitu pada tahun 1951 jang mentjapai diatas US \$. 1,- milyar. Apabila kita bandingkan dengan waktu jang sama dalam tahun 1968, maka angka tadi berarti kenaikan sebesar 16,2%.

Sebab-sebab kenaikan ini ialah meningkatnja volume ekspor, untuk bahan-bahan tertentu, serta adanya kenaikan harga-harga dipasaran Luar Negeri untuk beberapa matjam bahan ekspor.

Kenaikan jang sama djuga terdjadi dibidang impor. Dalam tahun 1969/1970 impor kita naik djika dibandingkan dengan tahun sebelumnja; meliputi djumlah sedikit diatas US S. 1,— milyar. Komposisi barang-barang impor djuga makin positif ialah makin besarnja pemasukan bahan-bahan untuk peningkatan produksi dalam negeri.

Kenaikan ekspor dan impor ini, merupakan indikasi pula, bahwa kegiatan ekonomi kita makin bergerak maju dan pembangunan/peningkatan produksi djuga tertjapai.

Berbitjara soal produksi, maka produksi beras mentjapai 10,8 djuta ton, jang berarti lebih tinggi daripada target jang ditentukan dalam REPELITA.

Produksi dibidang pertanian lainnja djuga naik, seperti : hasil-hasil perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan laut. Sedangkan produksi hasil pertanian lainnja seperti ketela dan djagung, djuga perikanan ,darat turun, jang disebabkan oleh timbulnja salah musim dibeberapa Daerah.

Dibidang industri, produksi tekstil naik dengan 30% ; hingga mentjapai 449 djuta meter; dan produksi benang tenun naik 22%. Ketjuali produksi pupuk dan rokok jang menurun, maka kenaikan djuga kita tjapai pada produksi semen, ban mobil, sabun, minjak kelapa dan barang-barang industri lainnja.

Dalam bidang pertambangan, produksi minjak bumi naik, sedangkan sistim distribusinja djuga telah diadakan perbaikan dengan peningkatan armada kapal tangki, penambahan pompa-

pompa bensin dan lain-lain. Timah, nikel dan bauksit juga naik dengan adanya rehabilitasi dan perluasan-perluasan usaha.

Gambaran singkat keadaan produksi yang umumnya naik itu, merupakan hasil-hasil yang didukung oleh kemajuan-kemajuan sangat besar dalam rehabilitasi dan pembangunan jalan-jalan, jembatan, bendungan-bendungan dan irigasi, listrik; demikian juga makin baiknya alat-alat pengangkutan — di darat, laut dan udara — serta telekomunikasi. Berapa panjang jalan dan jembatan yang direhabilitir dan di-upgrade, berapa pertambahan frekwensi penerbangan dan lain-lain, angka-angka dapat saudara-saudara lihat dalam lampiran.

Saudara-saudara ;

Walaupun pusat kegiatan pembangunan dewasa ini pada bidang ekonomi, namun kita juga telah mengadakan kegiatan-kegiatan pembangunan dibidang kesedjahteraan Rakyat yang meliputi: pendidikan dan kebudayaan, agama, kesehatan dan keluarga berencana, transmigrasi, tenaga kerja, sosial, perumahan dan air minum dan sebagainya.

Telah kita mulai usaha peningkatan mutu pendidikan Sekolah Dasar yang meliputi usaha-usaha pembaharuan kurikulum dan metode mengajar. Telah dibagikan 3,3 juta buah buku pelajaran untuk sekolah-sekolah dasar, direhabilitir 175 sekolah kejuruan dan lebih 100 buah yang diperluas, dibangun 12 buah instalasi pendidikan teknik, direhabilitir 40 buah sekolah Pendidikan Guru, dan sebagainya.

Dibidang pendidikan tinggi pembinaan ditunjukkan pada peningkatan Fakultas-fakultas Eksakta Pembina; terutama dengan membangun gedung-gedung laboratorium dan peralatan bagi 40 buah Perguruan Tinggi, tambahan perpustakaan bagi sejumlah Perguruan Tinggi, dan bantuan dibidang penelitian bagi 20 buah Perguruan Tinggi Pembina.

Juga telah diadakan kegiatan-kegiatan pembangunan dibidang pendidikan masyarakat, olah raga dan kesenian.

Saja sangat menghargai, bahwa dibidang pendidikan dasar, kegiatan-kegiatan dari Pemerintah Daerah dan masyarakat sendiri banyak dilakukan.

Sementara itu sejumlah mesdjid-mesdjid di Biak, Ambon, Padang, Djakarta, Demak, Bogor, Surakarta, Bandung dan Samarinda telah direhabilitir, disamping usaha-usaha penerbitan dan pentjetakan buku-buku agama Serta pasilitas keagamaan lainnja.

Dibidang kesehatan telah dilaksanakan program-program pendidikan kesehatan masyarakat, pemberiniasan penjakit menular, pembangunan prasarana kesehatan, pendidikan tenaga kesehatan, pengadaan obat-obat dan alat-alat kesehatan, dan sebagainya. Rehabilitasi 42 rumah sakit telah dilakukan; sedangkan BKIA jang direhabilitir dan diperluas tersebar di 10 Propinsi.

Saat ini kita mempunjai 40.000 Lembaga Sosial Desa; jang dalam tahun ini mutu pengurusnja telah ditingkatkan.

Usaha-usaha memberi lapangan kerdja masih sangat terbatas. Akan tetapi dengan projek-projek padat karya hampir 75 ribu penganggur dan setengah penganggur dapat pekerdjaan setiap hari untuk waktu 3 sampai 6 bulan pada projek-projek padat karya jang tersebar di 18 Kabupaten di Djawa dan Bali. Hasilnja memadai : sekitar 150 ribu Ha sawah dapat diairi, lebih dari 100 Km saluran irigasi diperbaiki dan perbaikan 100 Km djalan.

Chusus bagi Irian Barat, pembangunan pelaksanaan untuk sektor-sektor jang dianggap paling vital, ialah sarana perhubungan darat, laut dan udara dan pendidikan dasar jang dilaksanakan dengan pembentukan „task-forces”.

Bantuan Rp. 100.000,— kepada setiap Desa, ternjata telah membawa hasil-hasil jang sangat besar. Seluruh bantuan sebesar Rp. 4,6 miliar itu, setelah dikembangkan dengan swadaja dan usaha gotong-rojong, ternjata sekarang berkembang mendjadi kurang lebih 65 ribu projek-projek Desa jang meliputi nilai sebesar Rp. 13,— miliar.

Inilah wujud proyek-proyek desa itu:

- 31 ribu proyek prasarana produksi; 24 ribu diantaranya adalah proyek pengairan yang dapat mengairi swab seluas 720 ribu ha;
- 22 ribu bush proyek prasarana perhubungan; yang hampir 3/4-nya berwujud jembatan-djembatan desa;
- 8 ribu proyek-proyek pemasaran; separohnja adalah rehabilitasi pasar-pasar desa dan sisanja pembangunan lumbung-lumbung desa;
- 3 ribu proyek-proyek lain seperti madrasah, mesdjid, sekolah,sekolah dan balai desa.

Kepada Kepala-kepala Desa dan kepada semua masyarakat desa yang telah berhasil membangun Desanja, saja sampaikan penghargaan dan utjapan selamat.

Mengenai bidang HANKAM, dalam REPELITA yang sekarang ini memang belum diadakan pembangunan dalam arti sesungguhnya. Langkah-langkah yang diadakan sekarang ditujukan kepada reorganisasi, refungsionalisasi dan konsolidasi, serta persiapan-persiapan untuk melaksanakan pembangunan HANKAM bila kemampuan keuangan Negara telah memungkinkan nanti.

Saudara Ketua;

Dilihat dari sasaran yang ditetapkan, dapat saja dikatakan bahwa pelaksanaan tahun PERTAMA dapat ditjapai.

Banyak pengalaman yang telah kita peroleh dalam pelaksanaan tahun pertama REPELITA ini. Pengalaman itu telah digunakan untuk memperbaiki penjurusan rentjana tahunan dan pelaksanaan selanjutnja.

Seperti yang telah saja katakan dua tahun yang lalu, dengan penekanan pelaksanaan REPELITA pada rentjana tahunan maka kita dapat terus menerus memperbaiki pelaksanaan Pembangunan itu. Administrasi Pembangunan sungguh merupakan hal baru bagi kita,; dan usaha penjempurnaan dalam tahun-tahun yang akan datang masih banyak harus kita lakukan.

Penertiban Aparatur Negara :

MFRS telah menugaskan kepada Pemerintah/Mandajaris untuk melandjutkan penjempurnaan dan pembersihan setjara menjeluruh Aparatur Negara dari tingkat Pusat sampai ke Daerah.

Saja sangat sadar, dalam tugas ini termasuk pemberantasan korupsi.

Mengenai pemberiniasan korupsi ini tidak ada perbedaan pendapat diantara kita.

Mahasiswa, pers, masjarakat, semua orang jang djudjur, saja sendiri, mempunjai satu tekad jang sama: korupsi harus di-berinias.

Dilihat dari semua segi, korupsi tidak dapat kita biarkan. korupsi merugikan keuangan Negara jang berarti merugikan Rakjat, membahayakan pembangunan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan moral dan rasa keadilan.

Djustru karena sedjalan dengan tugas saja, dengan tekad saja, dengan langkah langkah jang telah saja ambil, maka saja sambut dengan baik dukungan moral dari masjarakat kepada saja dalam memberantas korupsi ini.

Tidak perlu diragukan lagi : Saja memimpin langsung pemberiniasan korupsi!

Tetapi kita harus sadar; bahwa korupsi bukan satu-satunja soal jang kita hadapi. Perhatian kita djangan teralih dari satu tudjuan pokok : ialah suksesnja Pembangunan Lima Tahun.

Lihatlah surat kabar. Setiap hari memuat setjara menjolok berita-berita korupsi; malah ada orang mengatakan bahwa kita — Bangsa Indonesia ini — sudah berkebudajaan korupsi. Ini sungguh berlebih lebihan.

Tidak! Bangsa kita bukan kumpulan orang-orang jang tidak bermoral; kita bukan Bangsa jang tjurang.

Kampanje ini korupsi memang baik; tindakan terhadap koruptor memang keharusan. Tetapi djangan sampai kita kehilangan kepertjajaan pada diri sendiri, djangan berita-berita

korupsi itu membuat kita ragu-ragu bahwa pembangunan sudah mulai berdjalan dan mentjapai banjak hasil, djangan sampai bertjampur-aduk antara dugaan dan kenjataan.

Peringatan saja ini djangan disalah-artikan.

Saja tidak memberi „angin” kepada koruptor! Korupsi memang masih ada dan harus kita berinias. Siapapun — tanpa pandang bulu — jang terbukti melakukan korupsi pasti diseret kedepan Sidang Pengadilan.

Pemerintah mengatasi masalah korupsi ini setjara integral, sehingga dapat kita berinias setjara menjeluruh; baik dengan langkah-langkah preventif maupun langkah-langkah represif.

Tindakan preventif ditudjukan untuk menghilangkan sebab-sebab timbulnja dan hal-hal lain jang memungkinkan tindakan korupsi.

Menurut penilaian saja, sebab utama meluasnja korupsi (dalam arti luas) adalah keadaan ekonomi jang serba sulit, jang akibat buruknja dirasakan disegala segi kehidupan masjarakat, termasuk pengaruh negatip terhadap nilai-nilai moral dan kebiasaan.

Tubuh aparatur tidak luput dari pengaruh ini bahkan pengaruhnja sangat parah terlebih-lebih karena gadji pegawai (termasuk ABRI) sebagai akibat derasnja inflasi hampir-hampir tidak punja arti sama sekali, sehingga sangat sulit untuk mengendalikan disiplin dan tata-tertib kepegawaian.

Difihak lain keadaan aparatur sendiri waktu itu djustru dalam keadaan kalut dan berlebihan karena Pemerintah waktu itu menguasai dan mengurus hampir semua kehidupan ekonomi ; jang djelas mengakibatkan hambatan-hambatan ekonomis dan menimbulkan sumber-sumber korupsi.

Oleh karena ra saja berkejakinan bahwa untuk dapat memberinias korupsi setjara menjeluruh, tindakan jang pokok adalah tindakan preventif — tanpa mengabaikan tindakan represif --, dengan mengusahakan perbaikan ekonomi, jang dewasa ;ini memang mendjadi program utama kita semua, dan

sedjalan dengan itu, djuga perbaikan aparatur negara baik organisasinja, prosedur dan tata-kerdjanja dan personil termasuk gadjinja.

Sebenarnya kita telah beberapa kali mengambil langkah-langkah dibidang ekonomi dan merupakan tindakan jang bersifat preventif dalam mengatasi banjaknja pelanggaran ekonomi dan tindakan koruptif.

Tindakan Pemerintah mengadakan deposito berdjangka dengan bunga jang realistis, telah berhasil menghilangkan peredaran „uang panas”, menariknja kedalam bank untuk disalurkan ke kegiatan jang produktif serta memperkuat pengendalian inflasi.

Dalam usaha pemberiniasan penjelundupan keluar negeri, maka langkah-langkah dibidang ekonomi (setjara preventif) ialah dengan mengadakan pengaturan sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan ekspor dapat latjar dan memberikan djaminan keuntungan kepada eksportir jang wadjar, ternjata lebih berhasil, daripada mengerahkan armada Angkatan Laut dan Bea Tjukai — langkah represif — seperti jang kita lakukan sampai pada tahun 67-an.

Demikian pula, maka berhasilnja usaha menjediakan barang jang tjukup dipasaran, akan menghilangkan dengan sendirinja perbuatan penimbunan, tjatut dan lain-lain perbuatan pelanggaran.

Penjempurnaan aparatur negara dan aparatur perekonomian negara jang telah dilakukan, disamping bertudjuan untuk meningkatkan kemampuan untuk mendjadi penggerak pembangunan, djuga sekaligus untuk menutup kemungkinan dilakukannja korupsi.

Demikian pula langkah-langkah de-birokratisasi dan penje-derhanaan prosedur impor, ekspor, perbankan dan devisa jang terus-menerus diambil sedjak tahun 1966 hingga peraturan 17 April jang lalu, disamping untuk melaksanakan haluan ekonomi jang digariskan oleh MPRS; djuga sekaligus menghindarkan terlalu banjak didjamahnja urusan-urusan ekonomi dan peridjinan oleh aparatur pemerintahan dan pedjabat-pedjabat.

Dibentuknja panitia-panitia khusus untuk menampung dan menilai permohonan idjin penanaman modal dan kredit luar negeri ; kebidjaksanaan pengurusan bantuan luar negeri melalui Pemerintah (G to G) Serta penentuan persjaraan „non-diskriminasi” terhadap penerimaan bantuan dari luar negeri, bukan sadja untuk memperlatjar dan memperoleh penilaian jang objektif, tetapi djuga untuk mentjegah „permainan” jang koruptif.

Langkah penting jang telah diambil oleh Pemerintah selama ini, bahkan jang telah dimulai sedjak Kabinet Ampera dahulu, dalam bidang penertiban aparatur negara jang meliputi bidang struktur, prosedur, personil dan material, dapat disebutkan sebagai berikut :

(1) Penjederhanaan organisasi pemerintahan dimulai dari tingkat tertinggi. Pada awal tahun 1966 itu Kabinet „100 Menteri” segera disederhanakan mendjadi kurang dari dua puluh lima sadja.

Lembaga-lembaga negara non-departemen jang kurang perlu djuga lembaga-lembaga negara jang inkonstitusionil — telah dibubarkan.

(2) Djuga telah diambil langkah berikutnya, ialah pene-gasan dan penjeragaman struktur semua Departemen. Ialah dengan mengadakan unsur staf dan perentjanaan oleh Sekretariat Djenderal, unsur pelaksana oleh Direktorat Djenderal dan unsur pengawasan oleh Inspektorat Djenderal.

(3) Pengangkatan Menteri Negara Penjempurnaan dan Penertiban Aparatur Negara dimaksudkan djuga untuk meng-intensifkan usaha penertiban aparatur negara ini.

(4) Pengaturan kembali tugas pokok dan fungsi berbagai aparatur negara setjara wadjar ; seperti : pengembalian fungsi Kedjaksanaan, penegasan tugas pokok dan fungsi Kepolisian Republik Indonesia, pengalihan tanggung-djawab pelabuhan dari ABRI kepada aparatur sipil, penegasan fungsi Gubernur/Kepala Daerah sebagai penguasa tunggal didaerah, dan jang

baru-baru ini raja keluaran tentang penegasan dan perintjian tugas Asisten Pribadi Presiden.

(5) Perusahaan-perusahaan Negara djuga ditertibkan. BPU-BPU dihapuskan dan tidak diadakan badan-badan baru dalam bentuk apapun jang mendjurus kepada lahirnja BPU „gaja baru”. Perusahaan-perusahaan Negara jang njata-njata rugi atau bidang usahanja tidak perlu dikerdjakan oleh Negara, dihapuskan.

(6) Dalam rangka penertiban penggunaan keuangan Negara telah ditentukan tata-tjara dan prosedur jang sekiranya dapat mentjegah terdjadinja penjelewan-penjelewengan. Untuk Anggaran Pembangunan, maka setiap projek pembangunan diharuskan menjusun DIP — ialah Daftar Isian Projek -, disamping pertanggungan-djawab setiap selesainja tahun anggaran.

(7) Dalam setiap tahun anggaran — dengan Keputusan Presiden — ditentukan tjara-tjara penggunaan anggaran negara, jang antara lain menentukan tjara-tjara pengadjuan realisasi anggaran ; pembelian barang ; pertanggungan-djawab keuangan ; penjimpanan uang pada Bank-bank Pemerintah dan lain-lain (Perhatikan Keputusan Presiden No. 33 tahun 1969 dan Keputusan Presiden No. 24 tahun 1970) .

(8) Dibidang materiil — sedjak tahun ini — telah dikeluarkan pedoman standardisasi kendaraan dan rumah dinas, bagi pedjabat-pedjabat jang berhak mendapatkan kendaraan dan rumah dinas.

(9) Djuga telah dikeluarkan ketentuan-ketentuan penegasan mengenai pengurusan barang inventaris (Perhatikan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1970).

(10) Mengenai ketentuan pendjualan rumah negeri dan kendaraan dinas kepada pegawai negeri, sedang diusahakan penjempurnaannja, sedangkan peraturan-peraturan jang berlaku (termasuk bagi Bank-bank Pemerintah) hingga kini masih dibekukan.

(11) **Tindakan-tindakan lainnja.**

Ketentuan-ketentuan tersebut telah dan, sedang dilaksanakan dan hasil-hasilnja dapat dirasakan; ada perbaikan-perbaikan dalam tubuh aparatur Pemerintah, meskipun usaha-usaha penertiban dan penjempurnaan tetap terus dilakukan.

Tindakan-tindakan represif dalam pemberiniasan korupsi dan penjelewengan lainnja djelas telah dilakukan.

Pada tahun 1968 raja telah membentuk Team Pemberiniasan Korupsi jang antara lain bertugas memberantas korupsi dengan melakukan tindakan-tindakan hukum setjepat-tjepatnja dan setertib-tertibnja; dan berwenang melakukan tindakan terhadap oknum sipil maupun ABRI. Badan sekarang sedang melakukan penjempurnaan untuk dapat bertindak lebih efektif, tepat dan tegas.

Untuk mengatasi masalah penjelundupan jang banjak terdjadi pada tahun-tahun '66, '67, '68 — termasuk jang dilakukan oleh atau dengan nama ABRI — saja telah membentuk Team Pemeriksa Penjelesaian Perkara Penjelundupan (TP-4) jang djuga mempunyai tugas dan wewenang untuk mengusut tindakan-tindakan, baik jang dilakukan oleh sipil maupun ABRI.

Dengan segala kekurangan-kekurangan jang ada dan dengan keterbatasan alat jang dimiliki oleh para petugas pengusut dan penuntut, mereka sebenarnja djuga telah bekerdja dan menjelesaikan banjak perkara korupsi.

Dalam tahun 1969 telah diadjukan kedepan Pengadilan 144 perkara korupsi, 90 buah diantaranja telah diputus. Sementara itu, masih terdapat 33 buah perkara korupsi lainnja jang masih dalam taraf penjidikan oleh aparatur Kedjaksanaan diseluruh Indonesia. Dalam tahun ini — sampai bulan Djuli ---19 perkara telah diadjukan ke Pengadilan, 4 buah perkara telah diputus: sisanja masih dalam proses Pengadilan.

Dalam tahun jang lalu, diselesaikan 29 perkara penjelundupan, baik melalui Pengadilan Ekonomi, melalui Pengadilan POLRI maupun Pengadilan Militer.

Disamping proses melalui Pengadilan, mereka jang melakukan penjelewengan djuga dikenakan tindakan administratif dan

hukuman djabatana lainnja; seperti pemetjatan, pemberhentian, pemindahan, penurunan pangkat, dan sebagainya. Tindakan-tindakan jang telah diambil dibeberapa instansi antara lain jang menondjol adalah dilingkungan Bea Tjukai telah ditindak 138 orang; dilingkungan Pajak 118 orang dan diseluruh Bank-bank Pemerintah lebih dari 250 orang.

Saudara Ketua, Saudara-saudara sekalian;

Sajapun dapat memahami adanja perasaan kurang puas pada sebagian masjarakat — khususnja para mahasiswa —, jang menganggap usaha Pemerintah dalam menggarap korupsi masih kurang drastis.

Sebagai salah satu usaha untuk mentjari djalan jang lebih sempurna, maka pada achir Djanuari tahun ini, saja mengangkat Dr. Moh. Hatta sebagai Penasehat Presiden dan membentuk Komisi-4 jang terdiri dari Saudara-saudara Wilopo,

Kasimo, Anwar Tjokroaminoto dan Johanes, dengan tugas :

- a. mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijaksanaan dan hasil-hasil jang telah ditjapai dalam pemberiniasan korupsi ;
- b. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai kebidaksanaan dalam pemberiniasan korupsi.

Pada tanggal 30 Djuni 1970 Komisi menjatakan bahwa tugasnja telah selesai dan minta agar Komisi dibubarkan. Saja menerima baik permintaan itu. Pada kesempatan ini sekali lagi saja ingin menjampaikan terima kasih atas pelaksanaan tugas Komisi.

Selama 5 bulan bekerdja, Komisi telah menjampaikan 7 buah pendapat dan saran-saran kepada saja. Seperti jang telah saja djandjikan beberapa waktu jang lalu, sekarang, kepada Dewan saja sampaikan hasil-hasil kerdja Komisi-4 serta langkah-langkah jang telah dan segera diambil oleh Pemerintah setelah saja mempeladjadi hasil-hasil kerdja Komisi itu.

Pada kesempatan ini saja akan menjampaikan pokok-pokoknja.

Pertimbangan-pertimbangan Komisi meliputi hal-hal yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

Pokok-pokok pendapat dan pertimbangan Komisi yang bersifat umum antara lain adalah sebagai berikut :

1. Sebab-sebab dan kemungkinan meluasnya korupsi :

Komisi berpendapat adanya 3 indikasi yang menyebabkan meluasnya korupsi ; ialah pendapatan atau gaji yang tidak menjangkupi, penyalah-gunaan kesempatan untuk memperkaya diri dan menyalah-gunakan kekuasaan untuk memperkaya diri.

Disamping itu Komisi juga menjabarkan kemungkinan meluasnya perbuatan korupsi berhubung dengan meningkatnya kegiatan dalam bidang ekonomi-pembangunan seperti perluasan perkreditan, bantuan luar negeri, penanaman modal asing dan lain-lain.

2. Kesigapan penuntut hukum (tindakan represif) :

- a. Supaya alat-alat penuntut hukum bertindak sigap dalam memberantas korupsi ;
- b. Supaya tubuh TPK disempurnakan ;
- c. Perlu diprioritaskan „perkara-perkara” : COOPA, CV. Waringin, PT. Minirust, Departemen Agama dan PN. Telekom.

3. Langkah preventif untuk memberantas korupsi :

Komisi menjarankan pokok-pokok langkah yang harus diambil untuk menjegah korupsi yang meliputi :

- a. Penjempurnaan struktur dan prosedur Administrasi Negara ;
- b. Penjempurnaan prosedur dan pengawasan pembelian Pemerintah ;
- c. Larangan penerimaan retour komisi ;
- d. Inventarisasi kekayaan Negara ;
- e. Pengawasan yang bersifat preventif dan represif agar benar-benar dilaksanakan ;

- f. Pengaturan kembali mengenai pendjualan rumah-rumah dinas dan larangan penjewaan barang-barang milik negara ;
- g. Keharusan pedjabat-pedjabat/petugas-petugas resmi menjimpan pendapatan valuta asing yang diterimanja pada Bank-bank Pemerintah didalam negeri ; serta memberi keterangan tentang penjimpanannja ;
- h. Perlu pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan Bea Tjukai dan Padjak ;
- i. Penertiban penjimpanan uang Negara.

Mengenai masalah-masalah khusus, Komisi memberikan pendapat dan pertimbangan-pertimbangannja disekitar persoalan-persoalan :

1. PN. PERTAMINA serta perusahaan minyak dan gas bumi pada umumnya ;
2. Masalah perkebunan, yang meliputi : perusahaan hutan, penerimaan Pemerintah dari ekspor hasil hutan, idjin eksploitasi hutan, pelaksanaan modal dibidang hutan, iuran hasil hutan dan hak perusahaan hutan;
3. Masalah BULOG, yang memuat penilaian Komisi-4 terhadap tugas utama BULOG, tindakan-tindakan operasional, struktur organisasi dan keuangannja.

Sidang yang terhormat ;

Dari berbagai langkah yang telah diambil oleh Pemerintah seperti yang telah dijelaskan tadi, tampak bahwa sebagian besar saran-saran Komisi-4 sesungguhnya sejalan dengan yang telah dikerdjakan oleh Pemerintah.

Saran-saran itu, djustru meyakinkan raja, bahwa djalan yang ditempuh oleh Pemerintah telah mendjurus kearah yang benar.

Beberapa saran Komisi-4 djuga segera dilaksanakan, antara lain :

1. Segera sesudah menerima saran-saran Komisi, saja telah memerintahkan kepada Djaksa Agung untuk menjempurnakan TPK. Reorganisasi tersebut telah diusahakan oleh Djaksa Agung.

2. Perkara-perkara jang menurut Komisi perlu didahulukan pemeriksaannya, seperti jang menjangkut COOPA, CV. Waringin, PT. Minirust, Departemen Agama, PN. Telekom dan sebagainya, sesungguhnya sudah sedjak semula diperiksa oleh alat-alat penuntut umum. Perkara-perkara jang tjukup bukti tindak pidananya telah diajukan kedepan Sidang Pengadilan.

Sudah barang tentu untuk perkara-perkara jang tidak tjukup bukti dan tidak terdapat tjukup unsur-unsur untuk dituntut, sulit untuk dipaksakan diajukan kedepan pengadilan.

3. Beberapa hari jang lalu, saja telah mengajukan kepada Dewan Rantjangan Undang-undang Ini Korupsi, jang dilihat dari segi hukum merupakan alat jang lebih kuat untuk memberantas korupsi. Saja sangat mengharapkan, agar Dewan bersama Pemerintah dapat menjelesaikan Undang-undang itu dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

4. Sedjalan dengan saran Komisi-4, pada awal bulan ini, saja djuga telah mengeluarkan keputusan jang mewadjabkan mendaftarkan kekajaannya pribadi bagi semua pedjabat teras Departemen-departemen, pegawai negeri gol. IV/c keatas dan Perwira Tinggi ABM.

5. Terhadap penilaian Komisi-4 mengenai hal-hal jang masih perlu ditertibkan pada BULOG dan PERTAMINA saja telah memerintahkan Menteri-menteri jang bersangkutan untuk meneliti dan meminta laporan dari pedjabat-pedjabat jang bertanggung-djawab.

Namun, dalam hubungan dengan penilaian terhadap kedua Badan tersebut, perlu saja mendjelaskan beberapa hal agar laporan Komisi-4 itu dapat dinilai dan ditanggapi setjara lebih wadjar.

Adalah tidak sesuai dengan kenyataan apabila ada gambaran seolah-olah kedua badan tersebut (BULOG dan PERTAMINA) berdjalan sendiri-sendiri tanpa pengawasan dan bimbingan dari Pemerintah. Djustru karena vitalnja kedua badan tersebut dalam kehidupan ekonomi kita (beras dan minjak) , maka Pemerintah memberikan perhatian khusus pula kepada kedua Badan tersebut. Pemeriksaan keuangan oleh Dinas Akuntan dan Pajak selalu dilakukan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

BULOG adalah badan pelaksana semata-mata, jang melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah. Pemerintahlah — bukan BULOG sendiri jang menetapkan tingginja floor price padi/beras, djumlah stock beras dalam tahun tertentu dan tiap-tiap bulan, djumlah pembelian beras didalam negeri dan impor dari luar negeri — bahkan dari mans diimpor —, harga djual maksimum kepada konsumen, besarnja rugi/subsidi kepada beras dari „bantuan pangan” dan sebagainja ; kesemnuanja harus dilaksanakan oleh BULOG dibawah bimbingan dan pengawasan serta dengan koordinasi dengan Departemen-departemen/Instansi jang bersangkutan.

Sudah djelas pula bahwa terkendalikannja harga beras dewasa ini, bukanlah hasil BULOG semata-mata melainkan berkat usaha Pemerintah dan Rakjat setjara keseluruhan.

Demikian pula dengan PERTAMINA. Sebagai PN, sesuai dengan peraturan perundang-undangan jang berlaku dipimpin oleh sebuah Direksi, jang bertanggung-djawab kepada Pemerintah dalam hal ini Menteri Pertambangan. Sungguh kurang tepat penilaian seolah-olah semua kegiatan dan usaha PERTAMINA itu tergantung atau ditentukan oleh seorang sadja jaitu Direktur Utamanja. Sesuai dengan prosedur, setiap putusan penting diambil setelah dibitjarkan dalam Direksi.

Disamping itu, perlu diketahui, bahwa PERTAMINA melaksanakan kegiatannja berdasarkan tugas jang diberikan oleh Pemerintah, ialah : mempertinggi produksi minjak dan melan-

tjarkan distribusi didalam negeri. Tugas mempertinggi produksi dilakukan dengan djalan

- berusaha sendiri, jang memerlukan investasi jang tidak ketjil;
- sebagai wakil/pemegang kuasa Pemerintah untuk melaksanakan kontrak karya dengan fihak asing, jang dilaksanakan dengan sjarat-sjarat jang paling menguntungkan bagi Indonesia.

Dalam memperlatjar distribusi didalam negeri ia harus melakukan investasi-investasi jang tidak ketjil, meliputi pelabuhan-pelabuhan, armada tanker, maupun pompa-pompa bensin dan pipa-pipa penjalur minjak.

Disamping itu, untuk menjediakan fasilitas-fasilitas guna menarik devisa para investor asing ia djuga mengadakan investasi-investasi jang dianggap perlu.

Pelaksanaan ini semua dilakukan oleh PERTAMINA dengan persetujuan dan dibawah pengawasan Pemerintah.

Berhubung dengan luas dan pentingnja usaha dibidang perminjakan ini, maka sesuai dengan saran Komisi-4, saja telah membentuk Panitia jang diketuai oleh Menteri Pertambangan untuk menjiapkan Rantjangan Undang-undang mengenai Perusahaan Negara Pertambangan Minjak.

6. Mengenai kehutanan, dewasa ini Pemerintah sedang mempeladjar kemungkinan peningkatan efektivitas dan efisiensi eksploitasi hutan kita, jang merupakan potensi dan sumber devisa itu. Penanaman modal dalam bidang ini harus benar-benar dapat dimanfaatkan bagi pembangunan Bangsa.

Kekurang sempurnaan pengurusan kehutanan kita dewasa ini antara lain disebabkan karena aparatur Pemerintah, chususnja aparatur kehutanan kita jang ada dewasa ini, kewalahan dalam melajani dan mengawasi pelaksanaan eksploitasi hutan sebagai akibat „ramainja” pelaksanaan Undang-undang Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri dibidang kehutanan.

Saudara Ketua;

Usaha-usaha untuk menjempurnakan langkah yang telah diambil terus dilakukan, terutama tindakan-tindakan pengawasan terhadap para pelaksana akan terus ditingkatkan dengan tjara-tjara yang lebih sistematis, baik melalui Irdjen-Irdjen yang ada di Departemen maupun dengan pemeriksaan-pemeriksaan mendadak oleh pedjabat-pedjabat yang berwenang untuk itu.

Saja ulangi lagi ketegasan yang tadi saja utjapkan : saja memimpin langsung pemberantasan korupsi ini, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh MPRS !

Pernyataan saja ini tidak perlu menggelisahkan pedjabat-pedjabat atau karyawan-karyawan. Siapa yang djudjur, siapa yang tidak bersalah, pasti dilindungi oleh *Pemerintah*; djuga dilindungi berdasarkan hukum.

Ja, saja tahu, tjukup banjak pegawai-pegawai negeri tjukup banjak karyawan-karyawan, tjukup banjak pedjabat-pedjabat yang sungguh-sungguh djudjur dan melaksanakan tugasnja dengan batik. Kepada mereka ini saja ingin menjatakan penghargaanja saja yang sedalam-dalamnja dan hormat saja yang setinggi-tingginja.

Pemerintah djelas memperhatikan nasib pegawai negeri.

Mungkin, yang dapat diberikan oleh Pemerintah belum men-tjukupi kebutuhan, tetapi yang djelas terus diusahakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Sedjak tahun 1967 hingga sekarang, Pemerintah telah 4 (empat) kali menaikkan gadji pegawai: dua kali dalam tahun 1967, sekali dalam tahun 1968 dan sekali lagi dalam tahun 1970; ditambah dengan menerima „gadji ke-13” disamping bantuan dalam bentuk pangan dan lain sebagainya.

Memang, ada pedjabat-pedjabat, ada karyawan-karyawan yang tampak hidup berlebih-lebihan. Mereka setjara demonstratif memamerkan kekajaannja. Inilah yang menimbulkan prasangka buruk dari masyarakat; bahkan menusuk perasaan Rakjat banjak yang masih serba kekurangan. Tindak-tanduk

kelompok ketjil ini dapat mentjemarkan nama seluruh aparaturnegara.

Bagi mereka jang setjara halal mendjadi kaja, kita memang tidak berhak mengusik atau iri hati. Tetapi, saja ingin mengetuk hati Saudara-saudara, saja ingin mengadajak Saudara-saudara, gunakanlah kekajaan itu untuk ikut Serta dalam proses pembangunan ini. Dan djangan hanja untuk „pameran” jang sama sekali tidak ada gunanja, bahkan menimbulkan salah faham,

Ja, djangan kita hanja memikirkan diri sendiri, djangan hanja memikirkan masa satu dua tahun kemuka; sebab, dalam tahun-tahun jang akan datang banjak persoalan-persoalan besar jang harus kita hadapi dan harus kita atasi.

Saudara-saudara;

Pemberiniasan korupsi — apalagi jang represif — tidak akan berdjalan latjar apabila tidak ada kesadaran dan bantuan dari masjarakat, jang saja maksudkan dalam menemukan dan membuktikan adanja kedjahatan korupsi itu sehingga mereka benar-benar dapat ditindak dan diadili.

Memang gampang kita menuduh dan menerka seseorang itu melakukan korupsi, sekedar karma ia hidup mewah, hidup berlebih-lebihan. Tetapi itu adalah sekedar perkiraan jang sulit untuk didjadikan dasar penjidikan atau penuntutan.

Kita dewasa ini sedang berusaha menegakkan hukum, bertindak berdasarkan hukum, mentjiptakan kepastian hukum dan keadilan, dan sedang berusaha menggairahkan kerdja, lapangan usaha dan daja kreasi masjarakat.

Maka apabila kita hanja bertindak „hantam kromo” sadja dengan dalih pemberiniasan korupsi, maka saja chawatir bukan ketertiban, keadilan dan kepastian hukum jang kita dapatkan, djuga bukan kegairahan bekerdja, melainkan perasaan keraguan, kechawatiran, ketidak-tenteraman dan kelesuan, bahkan kekatjauan suasana.

Kota harus realistis dan pragmatis dalam menggarap masalah ini dan pendekatan setjara preventif, pendekatan ekonomis adalah tjara tjara jang kita utamakan.

Namun usaha tindakan represif akan terus saja dilakukan. Langkah saja achir-achir ini untuk „buka praktek” menerima laporan langsung dari masyarakat adalah salah satu usaha kearah itu.

Maksudnja adalah untuk menampung laporan-laporan jang konkrit langsung dari mereka, jang mengalami, mendengar atau melihat langsung adanya korupsi.

Kalau Pemerintah menjatakan meminta bukti atau kesulitan memperoleh bukti, itu bukanlah memerlukan bukti jang berbentuk dokumen-dokumen fotocopy dan lain-lain sadja.

Jang saja harapkan adalah laporan kenjataan terdjadinja „kongkalikong” (collusion, menurut istilah Komisi-4) atau perbuatan-perbuatan jang menjeleweng lainnja, mengenai siapa, dimana dan kapan seseorang pedjabat itu minta atau menerima uang suap, uang hangus, uang komisi dan lain-lain. Inilah jang saja maksudkan dengan bukti njata. Dengan laporan atau bahan jang njata itu, sipelanggar/koruptor akan dapat diketahui, dan pasti ditindak. Ini memang memerlukan kesadaran, keichlasan serta keberanian dari sipelapor, dan untuk itu memang diperlukan djaminan pengamanan.

Apabila bantuan dari masyarakat ini benar-benar ada, saja yakin korupsi akan terberantas atau setidak-tidaknja dikurangi sampai batas jang minimal, dan kita akan benar-benar mempunjai aparatur jang sehat, bersih dan berwibawa.

Tentu sadja disamping harapan bantuan dari masyarakat ini, kegiatan penjelidikan dan „intelligence” dari alat-alat keamanan dan penegak hukum terus berdjalan untuk menangkap basah mereka jang korup, jang melakukan „collusion” itu.

Saudara Ketua ;

Itulah beberapa hal mengenai hasil Komisi-4, mengenai penerbitan aparatur dan penegasan sikap dalam memberantas korupsi, jang achir-achir ini mendjadi bahan pembitjaraan dan masalah jang agak membingungkan.

Dengan penegasan-penegasan ini saja mengharapkan agar masalahnja dapat diselami setjara sewadjaranja,

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air ;

Demikianlah hasil-hasil jang kita tjapai selama ini, hasil-hasil jang ditjapai Orde-Baru dan hasil-hasil pelaksanaan tahun pertama Rentjana Pembangunan Lima Tahun.

Setjara djujur dan objektif kita semua melihat, malahan kita sendiri merasakan, bahwa banjak kemadjuam jang kita tjapai selama 4 tahun jang terachir ini.

Namun demikian, ini tak berarti bahwa dengan keadaan sekarang ini, segala kesulitan sudah berachir, segala-galanja telah „beres”.

Kita sedang dan melandjutkan usaha membangun dari permulaan, diberbagai bidang kehidupan dengan segala kesulitan-kesulitannja Serta dengan kemampuan-kemampuan jang serba terbatas. Hasil demi hasil kita dapatkan, dam kita berusaha terus untuk mentjapai hasil jang lebih besar.

Chusus mengenai Aparatur Negara, saja mengerti sepenuhnya terhadap tuntutan masjarakat untuk memperbaiki aparatur.

Perbaikan aparatur memang sangat penting dan mutlak dilaksanakan; tetapi, pelaksanaan Pembangunan tidak kalah penting, malahan mutlak dikerdjakan, sekarang djuga ! Kita tidak mungkin menunda-nunda pelaksanaan Pembangunan dengan menunggu sempurnanja aparatur itu. Sebaliknya, kita melaksanakan pembangunan ini dengan terus memperbaiki aparatur; bahkan perbaikan aparatur itu merupakan bagian dari pembangunan dalam ini jang luas.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Sekarang tahun 1970.

Kita harus melihat kedepan menghadapi masalah-masalah dalam dasawarsa jang akan datang dan menentukan program-program kerdja kita.

Dalam jangka panjang, masalah pokok yang kita hadapi adalah pembangunan Bangsa dalam arti luas, „Nation building”.

Apakah hakekat pembangunan Bangsa dalam arti yang luas itu ?

Pembangunan Bangsa dalam arti yang luas meliputi pengembangan nilai-nilai dasar yang kita anggap vital, menumbuhkan tata-kehidupan masyarakat yang harmonis, mengembangkan bakat dan harkat manusia, memelihara dan mengembangkan lembaga-lembaga dan tata-tjara yang telah kita pilih untuk hidup ber-Bangsa dan ber-Negara ini.

Hakekat pembangunan Bangsa adalah perubahan menuju kemajuan dalam segala bidang, yang bagi Bangsa Indonesia, harus tetap berdasarkan Pantja Sila. Dengan singkat, inti persoalan pembangunan Bangsa kita adalah menumbuhkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi berdasarkan Pantja Sila itu.

Dewasa ini dan juga dalam tahun-tahun yang akan datang titik berat perhatian dan kegiatan kita memang masih harus kita pusatkan kepada pembangunan ekonomi. Saja selalu menekankan bahwa hal ini adalah keharusan ; justru karena perekonomian kita selama-sertahun-tahun tidak mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dan dalam keadaan terbengkalai. Kita harus mengedjar ketinggalan dibidang ekonomi ini, agar kita memiliki ketahanan Nasional yang seimbang dalam segala bidang ; bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial dan bidang pertahanan-keamanan. Hanja dengan ketahanan Nasional itu, kita mampu menghadapi bahaya-bahaya dari dalam maupun dari luar ; hanja dengan ketahanan Nasional itu kita mampu memperhebat pembangunan Bangsa ; dan hanja dengan ketahanan Nasional itu kita dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada dunia.

Dalam jangka pendek, dihadapan kita ada dua tugas pokok yang harus kita selesaikan sekaligus :

pertama, mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum ;
dan
kedua, mensukseskan pelaksanaan Pembangunan Lima
Tahun.

Saudara-saudara;

Bagi kita, Pemilihan Umum adalah alat, bukan tujuan ; walaupun Pemilihan Umum itu memang merupakan alat jang sangat penting. Tujuan pokoknja — seperti saja katakan tadi — adalah mengembangkan kehidupan demokrasi politik jang sehat berdasarkan Pantja Sila; artinja Rakjat dengan aktif ikut menentukan haluan Negara, Rakjat dengan efektif mengontrol pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah dalam melaksanakan haluan Negara tadi dan Rakjat melaksanakan haluan Negara jang ditentukannja sendiri. Tidak bisa lain, arah demokrasi kita haruslah berorientasi kepada program (program oriented), bahkan harus meningkat kepada orientasi hasil (achievement oriented). Hanja demokrasi jang demikianlah jang benar-benar akan bermanfaat bagi pembangunan Bangsa kita.

Dengan selesainja Pemilihan Umum nanti, dengan terbentuknja M.P.R. dan D.P.R. dan D.P.R.D., berarti kita bersamasama menantjapkan satu tonggak sedjarah jang baru dan penting artinja bagi kehidupan demokrasi kita. Kita mengharapkan tonggak baru itu tidak lain akan berarti, kita membangun djalan jang lebih terang dan lurus kearah achir periode transisi jang sekarang ini ; dan kita meneruskan perdjalananan sedjarah kita dengan normalisasi keadaan.

Ja, saja tegaskan, masa depan kita harus masa jang „normal” itu, jang tertib, dinamis dan mantap.

Kita tidak boleh lagi hidup dari kegontjangan jang satu disusul dengan kegontjangan jang lain, kita tidak boleh lagi berada dalam periode transisi jang satu berpindah ke transisi jang lain, kita tidak ingin lagi mengalami krisis jang satu beralih ke krisis jang lain.

Hidup dalam suasana „normal” djuga tidak berarti „adem ajem”. Normalisasi keadaan berarti sistim konstitusionil kita berdjalan dengan efektif, demokrasi kita tumbuh dengan kuat, hukum kita tegak dengan pasti, aparaturnegara kita berdjalan dengan tertib, hubungan antara kekuatan-kekuatan sosial dan masjarakat kita harmonis. Inilah jang saja maksudkan dengan stabilisasi politik jang dinamis ; artinja, masjarakat bergerak maju tanpa bergontjang-gontjang, karena telah menemukan norma-norma dan tjara-tjara jang pasti dan mantap.

Masjarakat jang demikian itulah wadjah Orde-Baru jang kita tjita-tjitakan.

Tjukup djelas bagi kita, bahwa Pemilihan Umum nanti adalah tjara untuk melahirkan stabilisasi dan normalisasi kehidupan politik dan Ketata-Negeraan kita. Itulah sebabnja saja terus-menerus mengadjak kita semua — dan saja ulangi untuk kesekian kalinja — marilah kita pelihara stabilisasi politik itu sebelum, selama dan sesudah Pemilihan Umum jang akan datang. Djangan sampai, karena Pemilihan Umum itu, kegontjangan-kegontjangan atas stabilisasi politik malahan akan timbul kembali.

Kehidupan politik jang berpangkal pada penghimpunan kekuatan — seperti djaman „liberal” maupun djaman „nasa-kom” — harus kita tinggalkan; dan kita harus membangun kehidupan politik Baru jang berdasarkan moral dan pikiran sehat.

Kota semua berusaha keras mengachiri periode transisi sekarang ini, kita semua berusaha keras mewudjudkan normalisasi keadaan, kita semua berkepentingan atas stabilisasi nasional; sebab itu kita semua harus menjelamatkan Pemilihan Umum jang akan datang.

Landasan dan sjarat pokok untuk mentjapai itu semuanya telah kita miliki bersama. Bukan sjarat baru, melainkan sjarat jang makin mejakinkan dari pengalaman sedjarah kita; malahan sjarat jang kita tanamkan bersama-sama dengan lahirnja

proklamasi seperempat abad jang lalu, sjarat jang kita ikrarkan dalam menegakkan Orde-Baru sekarang ini, dan akan tetap kita pertahankan setelah selesainja Pemilihan Umum nanti, jaitu Pantja Sila dan Undang-undang Dasar 1945. Partai ataupun golongan manapun, jang menang dalam Pemilihan Umum itu, dan dalam berusaha untuk memenangkannja, apabila kita, tetap setia kepada kedua landasan pokok itu, Insja Allah kita akan dapat sampai pada tudjuan-tudjuan itu.

Dalam kehidupan kepartaian, sebenarnya tjara-tjara jang praktis — rasionil dan mungkin efektif untuk menudju pada keadaan jang saja gambarkan diatas, telah kita rintis bersama. Pengelompokan partai-partai jang telah mulai kita laksanakan haruslah kita teruskan dengan bentuk, bentuk dan isi jang lebih njata.

Dalam kehidupan sosial, ketinggian dan ke-tua-an hidup budaya kita; rasa toleransi antar golongan, suku dan agama; kekuatan semangat, daya kreasi dan kegotong-rojongan; sungguh merupakan modal dan unsur-unsur positif untuk bergerak maju dan membina keadaan masa depan Bangsa jang tjerah itu.

Saudara-saudara sekalian;

Bagaimana prospek dan kelandjutan usaha pembangunan kita dalam tahun-tahun Sang akan datang ini?

Pembangunan bukanlah suatu proses djangka pendek. Pengalaman dari semua bangsa jang telah berhasil dalam usaha pembangunannja menundjukkan bahwa proses pembangunan adalah proses djangka pandjang. Suatu proses jang bukan sadja meliputi tahunan melainkan puluhan tahun, bahkan ada bangsa-bangsa jang memerlukan waktu lebih dari satu abad.

Dewasa ini Bangsa Indonesia telah mulai proses pembangunan tersebut. Suatu proses pembangunan setjara berentjana jang dituangkan dalam Rentjana Pembangunan Lima Tahun. Rentjana Pembangunan tersebut barulah merupakan Rentjana Pembangunan jang pertains. Oleh karena proses pembangunan adalah proses djangka pandjang, maka Rentjana Pembangunan

Lima tahun jang pertama ini tidak berdiri sendiri melainkan merupakan suatu matarantai daripada rangkaian rentjana-rentjana pembangunan lima tahun dimasa depan.

Pada waktu ini Rentjana Pembangunan lima tahun kita jang pertama dituangkan dan diperintji dalam rentjana tahunan *jang* terutama, berbentuk Anggaran Pendapatan dan Belandja Negara. Sebagaimana halnja APBN setiap tahun harus menjerminkan, penggarisan serta sistim-prioritas jang telah ditetapkan dalam. Rentjana Pembangunan Lima Tahun, maka *dilain* pihak- Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang pertama harus pula ditempatkan dalam perspektif jang lebih djauh, jakni dalam hubungannja dengan Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang kedua dan selandjutnja.

Dilihat dalam rangka perspektif djangka djauh maka usaha pembangunan Indonesia antara lain harus berhasil meniadakan kelemahan-kelemahan struktural ekonomi Indonesia sebagai warisan. suatu ekonomi kolonial. Struktur ekonomi Indonesia dewasa ini menunjukkan betapa besar peranan sektor pertanian, dibanding dengan sektor-industri dan lain-lain. Sebagian besar dari produksi nasional berasal dari sektor pertanian, sedang sebagian besar dari Rakjat Indonesia bermata-pentjaharian dalam sektor pertanian. Struktur ekonomi jang berat sebelah ini pada dirinja mengandung kelemahan-kelemahan. Kelemahan struktural lain daripada ekonomi Indonesia , ialah kenjataan bahwa sebagian besar ekspor Indonesia terdiri atas bahan-bahan mentah hasil pertanian dan pertambangan, Komposisi ekspor jang demikian itu menjebabkan ekonomi Indonesia sangat peka terhadap gedjolak perkembangan harga bahan mentah dalam pasaran dunia.

Kelemahan-kelemahan struktural tersebut dalam djangka djauh harus ditiadakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam djangka djauh harus mendjadikan Indonesia suatu negara industri jang mampu untuk tumbuh setjara tjepat dan kumu latif. Dalam djangka. djauh komposisi ekspor Indonesia harus mendjadi lebih sehat dalam arti bahwa ekspor harus terutama.

terdiri atas barang-barang djadi jang merupakan hail industri dalam negeri. engan singkat apa jang harus terwujud dalam djangka djauh ialah suatu perombakan fundamental daripada struktur ekonomi Indonesia.

Dalam djangka djauh perombakan struktural ekonomi Indonesia merupakan suatu keharusan. Akan tetapi perombakan tersebut hanja akan berhasil bilamana dilaksanakan setjara bertahap. Apabila perombakan tersebut dilakukan tanpa perhitungan jang tenang dan tjermat, maka tidaklah mungkin tudjuan jang diharapkan itu tertjapai. Pembangunan industri setjara besar-besaran hanjalah mungkin terlaksana bilamana sudah ada basis pertanian jang kokoh kuat.

Industri memerlukan pasaran dan industri memerlukan bahan baku. Apabila sektor pertanian tumbuh dengan tjepat maka tingkat pendapatan dari sebagian besar dari rakjat akan meningkat dengan tjepat pula, sehingga dengan tjepat tumbuhlah pasaran jang diperlukan bagi hasil-hasil industri. Disamping itu, pertumbuhan sektor pertanian jang tjepat akan pula meningkatkan persediaan bahan baku bagi sektor industri. Lagi pula industri memerlukan tenaga kerdja, sedang para pekerdja memerlukan bahan pangan. Apabila sektor pertanian tidak berhasil menjediakan bahan pangan dalam djumlah jang tjukup setjara terus-menerus, maka pertumbuhan sektor industri akan sangat teranjam. Pembangunan industri memerlukan peralatan modal jang pada tahap-tahap pertama masih harus didatangkan dari negara-negara lain. Untuk ini diperlukan devisa dalam djumlah-djumlah jang sangat besar. Dewasa ini ada sektor-sektor jang banjak menghasilkan devisa dan jang potensiil masih dapat menghasilkan devisa lebih banjak lagi, yakni sektor-sektor pertanian dan pertambangan. Bilamana sektor-sektor ini dalam waktu dekat tidak berhasil tumbuh dengan tjepat, maka devisa jang diperlukan untuk meningkatkan proses industrialisasi tidak akan tersedia.

Dengan demikian djelaslah kiranja bahwa meskipun tudjuan djangka djauh adalah tertjiptanja suatu negara industri jang

tumbuh dengan pesat, namun dalam periode pertama prioritas utama harus diletakkan pada pertumbuhan yang cepat daripada sektor pertanian. Hanya dengan suatu sektor pertanian yang kokoh-kuatlah terdapat kondisi-kondisi yang memungkinkan proses industriasi segera berjalan.

Demikian pula halnya dengan komposisi ekspor. Dalam jangka jauh ekonomi Indonesia harus membebaskan diri dari ketergantungan kepada ekspor sejumlah bahan-bahan mentah yang sangat dipengaruhi pasaran dunia. Tetapi hal ini hanya akan dapat menjadi realitas dikemudian hari bilamana sekarang juga kita dengan sekuat tenaga mengembangkan sumber-sumber ekspor yang sudah ada.

Pertimbangan-pertimbangan tersebut itulah yang menyebabkan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pertama ini menetapkan sektor pertanian sebagai sektor sentral dan menetapkan pula peningkatan ekspor bahan-bahan pertanian dan pertambangan. Hal ini tidak berarti bahwa pembangunan industri diabaikan. Dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pertama ini yang diutamakan adalah industri-industri yang menunjang sektor pertanian, industri-industri menengah dan kecil yang banyak menciptakan kesempatan kerja dan industri-industri yang memperkuat neraca pembayaran kita.

Pada akhir Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pertama ini pengadaan pangan, khususnya beras, dari produksi dalam negeri *harus* sudah tidak menjadi soal lagi. Pada akhir periode lima tahun tersebut Indonesia harus sudah tidak perlu mengimpor beras lagi, dan produksi pangan harus sudah tidak merupakan masalah lagi, telah meningkat sedemikian rupa, sehingga pendapatan petani telah bertambah dengan nyata, sehingga pasaran bagi produksi industri semakin berkembang.

Pada akhir lima tahun itu produksi pertanian (termasuk kehutanan dan perkebunan) untuk ekspor sudah harus meningkat dengan cepat. Pada waktu itu kegiatan eksplorasi pertambangan diharapkan telah mencapai hasil-hasil yang positif sehingga produksi serta ekspor hasil pertambangan akan

bertambah dengan pesat. Demikian pula pada akhir masa itu perbaikan serta peningkatan prasarana yang kini sibuk dilaksanakan akan mentjapai sasaran-sasaran yang ditetapkan; sehingga proses pertumbuhan produksi akan semakin lantjar. Bidang pendidikan pada akhir jangka waktu lima tahun tersebut akan dapat menambah tenaga-tenaga teknis yang dapat menjumbangkan ketrampilan dan keahliannya bagi usaha pembangunan lebih lanjut.

Demikianlah kondisi ekonomi yang diharapkan tertjapai pada akhir jangka waktu lima tahun.

Sebelum jangka waktu tersebut berakhir maka kita harus sudah siap dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang kedua.

Dalam hubungan ini maka pagi-pagi kita harus sudah mulai mengambil langkah-langkah untuk mempersiapkannya. Bilamana sasaran-sasaran Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pertama benar-benar tertjapai dan dapat ditijptakan kondisi ekonomi seperti yang saja sebutkan diatas, maka terbukalah kesempatan untuk melaksanakan suatu Rencana Pembangunan Lima tahun yang sasaran utamanya adalah tertjapainya pertumbuhan yang seimbang antara sektor industri dan sektor pertanian, sehingga struktur ekonomi Indonesia akan menjadi lebih seimbang. Dengan pertumbuhan industri yang tcepat maka sekaligus komposisi ekspor akan bergeser sehingga berkurangnya ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap ekspor bahan-bahan mentah tertentu.

Keseimbangan antara pertumbuhan pertanian dan pertumbuhan industri yang akan menjadi sasaran utama Rencana Pembangunan yang kedua itu akan dibarengi pula dengan lebih menseimbangkan yang serasi antara pembangunan dibidang materiil dan pembangunan dibidang spirituil serta kesedjahteraan Rakyat. Keseimbangan ini akan saling memperkokoh satu sama lain sehingga mempertcepat pertumbuhan masing-masing pula.

Dalam rangka persiapan penjusunan Rentjana Pembangunan Lima Tahun jang kedua, maka tampilah masalah besar jang kita hadapi dalam dasawarsa tudjuh puluhan, yakni masalah pertumbuhan penduduk dan pentjiptaan kesempatan bekerdja. Masalah jang dihadapi bukan sadja tjepatnja pertumbuhan penduduk melainkan djuga pertumbuhan jang tjepat daripada tenaga kerdja. Persoalan ini bukanlah sesuatu jang baru melainkan suatu pentjerminan dan konsekwensi perkembangan sedjarah.

Bilamana kita sedjenak menengok kebelakang maka teringatlah kita bahwa dalam tahun-tahun empatpuluhan tingkat kematian adalah tinggi, sedang tingkat kelahiran adalah rendah. Sesudah perang kemerdekaan selesai dan setelah pengakuan kemerdekaan, maka tingkat kematian mulai menurun sedang tingkat kelahiran meningkat dengan tjepat. Mereka jang lahir dalam tahun-tahun limapuluhan itu akan mentjapai umur duapuluh tahun dalam dasawarsa tudjuh puluhan ini. Djumlah mereka banjak sekali. Mereka akan mentjari pekerdjaan. Mereka akan kawin dan membentuk keluarga baru.

Akibat perkembangan sedjarah ini harus kita hadapi dengan berusaha keras untuk mentjiptakan lapangan pekerdjaan jang lebih banjak. Kesempatan kerdja hanja dapat ditjiptakan dengan penanaman modal. Oleh karena itulah kita harus terus-menerus mengusahakan peningkatan penanaman modal, baik Pemerintah melalui Anggaran Pembangunan maupun oleh masyarakat sendiri. Didalam memilih dan melaksanakan projek-projek pembangunan senantiasa wadajib diusahakan agar dipakai tjara-tjara bekerdja jang menggunakan tenaga kerdja sebanjak mungkin. Kadang-kadang kita memang lebih suka memakai alat-alat modern dan tidak menggunakan banjak tenaga kerdja. Ketjenderungan tersebut harus dapat diserasikan dengan kebutuhan sosial ini. Untuk proses-proses produksi tertentu memang tidak ada djalan lain daripada menggunakan alat-alat modern, akan tetapi untuk kebanyakan pekerdjaan dapat digunakan tenaga kerdja dalam djumlah-djumlah jang be-

sar. Disamping kegiatan dalam pertanian dan perindustrian (chususnja industri menengah dan ketjil) maka dibidang prasarana, dalam bentuk perbaikan irigasi, perbaikan djalan dan sebagainya, dapat dimanfaatkan banjak sekali tenaga kerdja.

Demikian pula penggunaan sumbangan Pemerintah kepada Kabupaten-kabupaten. Jang dipilih bukan hanja projek-projek jang produktif melainkan projek-projek tersebut harus pula dapat menggunakan banjak tenaga kerdja.

Selanjutnja industri-industri menengah dan ketjil memerlukan banjak tenaga kerdja. Karena itu pertumbuhan industri-industri ini diusahakan untuk dipertjepat. Salah satu masalah utama bagi industri menengah dan ketjil ini adalah terbatasnja permodalan mereka, sedangkan dilain pihak mereka kebanyakan tidak memenuhi perajaratan-persjaratan perbankan untuk memperoleh pindjaman modal,

Dalam hubungan inilah dewasa ini sedang dipersiapkan suatu sistim asuransi kredit jang akan memungkinkan industri-industri menengah dan ketjil tersebut memperoleh pindjaman modal dari perbankan. Pemetjahan masalah keuangan dibarengi dengan peningkatan ketrampilan dan keahlian serta pertumbuhan pasaran, akan memungkinkan pertumbuhan jang tjepat dari industri-industri tersebut, jang berarti mempertjepat perluasan lapangan kerdja.

Dalam hubungan ini terbukanja kemungkinan jang luas akan penanaman modal di Daerah-daerah di Luar Djawa akan sangat menguntungkan bagi penserasian penjebaran penduduk dan tenaga kerdja jang dewasa ini terpusat di Djawa.

Dengan demikian djelas kiranja bahwa tudjuan pembangunan bukan sadja meningkatkan produksi, melainkan djuga untuk memperluas kesempatan bekerdja. Untuk ini kita harus lebih meningkatkan lagi kegiatan pembangunan sehingga tantangan tantangan jang kita hadapi dalam tahun-tahun tudjuh puluhan akan berhasil diatasi.

Saudara-saudara;

Walaupun sangat sibuk dengan masalah-masalah dalam negeri yang meminta seluruh perhatian dan kegiatan kita itu, namun kita tidak akan mengurung diri kita terlepas dari perhatian terhadap masalah-masalah dunia, oleh karena perkembangan keadaan Nasional kita, usaha pembangunan kita besar atau kecil juga akan terpengaruh oleh perkembangan keadaan dunia itu.

Dengan kemajuan ilmu dan teknologi dalam dasawarsa 60-an yang lalu, dunia kita seakan-akan bertambah sempit, sehingga saling hubungan antar bangsa-bangsa demikian eratnja dan kepentingan Nasional bangsa-bangsa makin djauh melintasi batas-batas wilayahnja.

Dalam mengikuti dan menilai keadaan dunia sekarang ini dapat kita menarik beberapa kesimpulan umum.

Pola-pola kekuatan besar didunia yang muntjul sedjak achir perang dunia kedua, dewasa ini sedang mengalami penggeseran-penggeseran yang tidak dapat ditentukan hanja oleh dua kekuatan raksasa dunia.

Perbedaan tingkat kesedjahteraan materiil antara. negara-negara yang sangat maju dengan negara-negara yang sedang membangun terasa makin lebar.

Pertambahan penduduk dunia — terutama dinegara-negara yang masih rendah kemajuan ekonominja --- sangat mentjemaskan, apabila tidak diikuti dengan pertambahan kebutuhan hidup yang lajak dan merata.

Sementara itu telah timbul kesadaran baru untuk membina kerdjasama dibidang sosial-ekonomi dunia antara negara-negara yang ekonominja maju dengan yang sedang membangun yang lebih positif dan produktif, yang menguntungkan kedua belah pihak.

Usaha-usaha untuk mengachiri perang yang sedang berkobar di Indo Tjina dan Timur Tengah, yang sewaktu-waktu dapat membakar seluruh dunia, sedang ditjarikan djalan-djalan yang

lebih efektif, karena tampaknja kekuatan sendjata sadja bukan merupakan. Alat jang ampuh untuk mentjapai penjelesaian,

Kita sambut perkembangan dan tjara pendekatan jang dilakukan sekarang ini dengan harap-harap tjemas Indonesia sungguh mempunjai kepentingan dalam hal ini.

Hanja dalam dunia jang damai, kita dapat membangun.

Hanja dalam dunia jang damai, masalah-masalah manusia. dapat dipetjahkan ; dan masalah pokok itu lama dimana-mana ; kesedjahteraan lahir dan bathin.

Sebab itu, politik luar negeri kita tidak bisa lain ialah politik perdamaian.

Muntjulnja kekuatan-kekuatan besar dunia, makin meluasnja kepentingan Nasional bangsa-bangsa, memang dapat mengobarkan api konflik. Akan tetapi, dilain fihak dapat djuga mendjadi kekuatan bagi kerdjasama bangsa-bangsa.

Soal jang kita hadapi adalah, disatu fihak, bagaimana kita dapat meng-serasi-kan perbedaan-perbedaan kepentingan itu sehingga dapat saling isi mengisi jang bermanfaat bagi semua bangsa dilain fihak, mentjegah perbedaan kepentingan tadi mendjadi konflik-konflik bersendjata. Konflik-konflik kepentingan Nasional, konflik-konflik kepentingan ekonomi dan konflik-konflik ideologi, sekarang terbukti tidak mungkin lagi diselesaikan melalui peperangan. Pengalaman menundjukkan, bahwa perang bukan djalan keluar untuk menjelesaikan masalah-masalah jang dihadapi dunia ini;

Oleh karena itu kita harus mentjari, menemukan dan membangun kekuatan lain jang lebih ampuh; kekuatan ratio dan moral diseluruh dunia berdasarkan-kepribadian masing-masing Bangsa ; untuk menghentikan peperangan jang sekarang masih berkobar dibeberapa bagian dunia, dan untuk menghimpun kekuatan dunia menghadapi perang lain jang lebih besar tetapi mulia, ialah perang melawan kemiskinan dan perbedaan jang, tadjam dalam kesedjahteraan materiil.

Kekuatan moral memang bukan satu-satunya alat yang sekaligus dapat menyelesaikan masalah-masalah dunia ; akan tetapi alat itu harus kita gunakan sekarang juga, malahan harus kita usahakan bersama, sehingga dapat menjadi tata pergaulan hidup antar bangsa-bangsa.

Kekuatan-kekuatan besar dunia, pihak-pihak yang terlibat dalam api peperangan ; perlu meneruskan usaha-usahanya, duduk bersama untuk mencari penyelesaian, demi kepentingan masing-masing, tetapi juga dengan memperhatikan kepentingan dunia pada umumnya.

Negara-negara yang sedang membangun, memang memerlukan bantuan negara-negara yang sudah maju ekonominya. Tetapi demikian juga sebaliknya.

Semua bangsa, pada akhirnya, saling butuh-membutuhkan.

Oleh karena itu semua bangsa harus mempunyai kemauan baik dalam memecahkan masalah-masalah bersama dengan cara rasional dan pragmatis atas landasan kekuatan moral tersebut.

Kita percaya akan manfaat ko-eksistensi dengan damai, tetapi alangkah mulianya apabila ko-eksistensi itu kita isi dengan ko-operasi untuk perdamaian dan kesedjahteraan bersama, tanpa mengusik kepribadian masing-masing yang dipilihnya.

Djalan itulah yang kita tempuh dalam politik luar negeri kita.

Dalam ruang lingkup dunia, politik luar negeri kita, arahkan untuk :

- meningkatkan dan memanfaatkan kegiatan-kegiatan Indonesia dibadan-badan internasional, baik pada tingkat pemerintahan maupun non-pemerintahan;
- meningkatkan hubungan kerdjasama dengan negara-negara non-aligned dan negara-negara Asia -- Afrika ;
- membina kedudukan yang seimbang dan konstruktif diantara blok Barat dan blok Timur dalam rangka politik luar negeri yang bebas-aktif.

Dalam ruang lingkup regional, bersama-sama negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara kita mengembangkan kerdjasama ekonomi, teknik dan kebudayaan untuk memelihara stabilitas dan kemandjuaan diwilajah kita.

Kerdjasama bilateral dengan negara-negara lain jang bersahabat djuga kita usahakan; dengan tetap memperhatikan kepentingan Nasional kita. Kundjungan saja keberbagai negara dan kundjungan Kepala-kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara lain ke Indonesia adalah dalam rangka memperdalam saling pengertian dan kerdjasama itu.

Terhadap kegentingan di Timur Tengah dan Indo Tjina kita djuga tidak diam berpangku tangan sadja.

Kita ikut memberikan sumbangan fikiran dalam konperensi Djeddah dan KTT Islam di Rabbat.

Mengenai masalah Kambodja, kita telah mengambil prakarsa mengadakan Konperensi para Menteri Luar Negeri untuk membantu menjelesaikan kemelut .di Kambodja, untuk membantu Rakjat Kambodja dalam menegakkan kedaulatan dan netralitasnja.

Dalam rangka memperkuat perdamaian dunia, Insja Allah, dalam bulan depan saja akan menghadiri KTT non-blok di Lusaka, Zambia.

Semua kegiatan itu adalah pelaksanaan dan peluasan kembali politik luar negeri kita.

Kita tidak pernah ragu-ragu akan politik luar negeri kita jang bebas aktif ; kita telah mendjalankannja dan kita tetap akan mendjalankannja.

Kita djuga tetap sadar, bahwa bagaimanapun pentingnja kekuatan moral tadi, maka kekuatan dalam negeri-lah jang menentukan segala-galanja.

Itulah sebabnja kita berusaha keras mewudjudkan ketahanan Nasional jang seimbang disegala bidang; jang sekarang kita titik beratkan kepada pembangunan ekonomi itu. Dengan kekuatan moral keluar dan dengan ketahanan Nasional kedalam,

kita akan dapat memberikan sumbangan jang lebih besar kepada terwujudnja perdamaian dunia dan kesedjahteraan umat manusia.

Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air;

Hari ini saja telah mengadjak Saudara-saudara membuat neratja seperempat abad Kemerdekaan kita. Hari ini kita telah mendjernihkan kembali fikiran mengenai dasar-dasar dan tudjuan Orde-Baru. Hari ini kita telah mentjoba melihat persoalan-persoalan besar dimasa depan.

Kita telah siap memasuki masa depan itu, karena kita telah meratakan djalan masa sekarang.

Strategi perdjjuangan Orde-Baru sudah benar dan langkah-langkah jang kita ambil sudah tepat. Ini sungguh satu modal jang besar. Modal ini harus kita pelihara dengan pelaksanaan jang lebih tepat dan tertib; disemua bidang !

Kekurangan kita memang masih banjak; kelemahan-kelemahan kita masih harus diperbaiki. Tetapi djangan kita hanja memandang kekurangan dan kelemahan itu, sehingga kita sendiri mendjadi lesu.

Kelesuan adalah musuh besar; lebih-lebih kelesuan tanpa alasan.

Mari! Lihat sinar terang masa depan kita, jang muntjul dari balik sisa-sisa mendung masa lampau !

Tetapi djangan mengharap jang bukan-bukan; perdjjalanan kita masih pandjang dan pekerdjaan masih bertumpuk-tumpuk.

Kita harus bekerdja sekarang, agar kita menikmati hari besok; malahan untuk anak-tjutju kita dimasa depan.

Dua puluh lima tahun jang lalu kita merebut Kemerdekaan, karena kita semua tjinta kepada Kemerdekaan dan Tanah Air ini. Sekarangpun — dan seterusnya —, kita tetap tjinta kepada Kemerdekaan dan Tanah Air itu.

Marilah kita tumpahkan ketjintaan itu kepada Pembangunan Bangsa ini, kepada kebesaran Republik ini. Kita tumpahkan tjinta itu dengan bekerdja keras dibidang masing-masing untuk

suksesnja pembangunan untuk suksesnja Pemilihan Umum dan untuk kebahagiaan anak-tjutju kita.

Negara kita memang termasuk muda baru mengindjak usia 25 tahun, tetapi Bangsa kita berkebudajaan tua dan tinggi.

Kita bangun negara kita mendjadi bangsa jang besar, tetapi tetap diatas kepribadian jang kokoh-kuat, kepribadian Pantja Sila.

Kita terus bekerdja hari ini. Kebahagiaan pasti datang hari esok.

Insja Allah. Semoga Tuhan Jang Maha Esa memberkahi kita semua.

Terima kasih.

Djakarta, 16 Agustus 1970.

Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO

DJENDERAL TNI
